

**Kolaborasi Filantropi Pada Pandemi COVID-19:  
Studi Manajemen Kolaborasi Gerakan Zakat  
Merespon Dampak Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021**



Oleh:  
**Maulana Kurnia Putra, S.Sos.**  
NIM 18200010017

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Master of Arts (MA.)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Studi Pekerjaan Sosial**

**Yogyakarta  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulana Kurnia Putra

NIM : 18200010017

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Maulana Kurnia Putra

NIM: 18200010017

STATE ISLAMIC U  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulana Kurnia Putra

NIM : 18200010017

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



**Maulana Kurnia Putra**

**NIM: 18200010017**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-688/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : Kolaborasi Filantropi Pada Pandemi COVID-19:  
Studi Manajemen Kolaborasi Gerakan Zakat Merespon Dampak Pandemi COVID-19  
Tahun 2020-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULANA KURNIA PUTRA, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010017  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

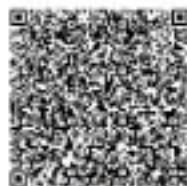
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 630535c9c7b62

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.  
SIGNED



Valid ID: 630477900ba6f

Penguji II

Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.  
SIGNED



Valid ID: 62fa3b90b941c

Penguji III

Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.  
SIGNED



Valid ID: 630bdc0c70a81

Yogyakarta, 15 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Kolaborasi Filantropi Pada Pandemi COVID-19: Studi Manajemen Kolaborasi Gerakan Zakat Merespon Dampak Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021**

Yang ditulis oleh:

Nama : Maulana Kurnia Putra  
NIM : 18200010017  
Jenjang : Magister  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Pembimbing



**Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.**

## ABSTRAK

Pandemi COVID-19 berdampak pada krisis multidimensi di Indonesia yang membutuhkan kerjakeras banyak pihak termasuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk menekan dampak negatifnya. Pada dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi gerakan filantropi Islam di Indonesia ikut memberi andil dalam kerja sosial. Pandemi COVID-19 membawa dampak perubahan pada manajemen Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menuju gerakan-gerakan kolaborasi antar organisasi di skala kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional yang dikelola dan diarahkan oleh Forum Zakat (FOZ) dan juga antar sektoral: negara, swasta, dan sipil.

Kedermawanan sosial pada awal pandemi COVID-19 dikonsolidasi dan dikolaborasikan oleh Forum Zakat (FOZ) di tingkat nasional untuk merespon dampak negatif di berbagai lapisan masyarakat. Untuk mengoptimalkan gerakan kolaborasi antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), maka diperlukan perencanaan dan strategi manajemen kolaborasi yang tepat. Penelitian ini melakukan analisis manajemen kolaborasi yang dilakukan oleh Forum Zakat (FOZ) nasional untuk mengoptimalkan fungsi dan peranan program-program anggotanya selama pandemi COVID-19 di Indonesia dengan kajian manajemen kolaborasi. Dengan metode studi kasus yang dilakukan Forum Zakat Nasional, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI. Yogyakarta, sehingga diperoleh deskripsi strategi pengelolaan kolaborasi organisasi pengelola zakat. Dengan harapan dapat diduplikasikan pada manajemen kerja sosial berbasis kawasan, kasus, ataupun wacana yang sedang terjadi sehingga dapat memberikan kerja sosial yang kompak dan berdampak secara efektif dan efisien yang melibatkan semua pihak.

**Kata kunci:** Forum Zakat, manajemen kolaborasi, COVID-19

## **KATA PENGANTAR**

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak April 2020 membawa dampak perubahan di semua bidang sosial masyarakat, termasuk salah satunya manajemen Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam penyelenggaraan program intervensi sosialnya. Perubahan ini karena yang biasanya antar lembaga seolah menjadi kompetitor lembaga lainya kini melalui wadah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), selama pandemi ini menjadi saling bahu membahu untuk saling mmebantu satu sama lain melalui skema kolaborasi program terpadu untuk bersama-sama mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Untuk mengoptimalkan gerakan kolaborasi ini perlu adanya strategi manajemen kolaborasi yang tepat untuk merespon kebutuhan di lapangan baik dengan pelbagai resiko sosial, ekonomi, maupun kebutuhan penanganan kesehatan. Dalam gerakan yang diinisiasi oleh Forum Zakat (FOZ) adalah langkah yang tepat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini segera berakhir melalui berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) anggotanya.

Pandemi COVID-19 ini melahirkan kepekaan sosial dunia terhadap hal yang terjadi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya gerakan sosial di seluruh dunia baik yang berbasis komunitas, lembaga atau gerakan yang bersifat sementara ikut berperan serta dalam penanganan pandemi. Artinya kekuatan kolaborasi ini sangat penting untuk menyelesaikan pandemi, sehingga perlu adanya strategi tepat untuk melakukannya agar kolaborasi berjalan dengan baik.

Laporan penelitian ini disusun untuk menganalisis penerapannya manajemen kolaborasi oleh Forum Zakat (FOZ) untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan lapangan, mengklasifikasikan kebutuhan lapangan dan menentukan strategi yang akan dilakukan untuk penanganan kasus dan pengembangan program di lapangan. Kemudian diharapkan melalui penelitian ini dapat menganalisis manajemen kolaborasi yang dilakukan Forum Zakat (FOZ) Nasional untuk mengoptimalkan peranan dan fungsi sosial Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) agar dapat menjadi kompak dan berdampak. Kami berharap, dengan adanya laporan penelitian ini dapat dipahami sebagai bagian dari sumbangan terhadap kajian sosial untuk kolaborasi di bidang lain jika sewaktu-waktu terjadi hal yang serupa yang memerlukan kolaborasi antar lembaga, komunitas atau gerakan untuk menyelesaikan masalah yang sama. Terimakasih terucap pada segenap pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian Tesis ini, teruntuk:

1. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D. selaku pembimbing tugas akhir pasca sarjana.
4. Bapak H. Muhammad Fuad Nasar, M.Sc. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mengayakan wacana penelitian ini.



5. Arifin Purwakananta selaku Deputy Pengumpulan BAZNAS Republik Indonesia yang telah memberikan tambahan dan penguatan pandangan dalam penelitian ini.
6. KH. Yusuf Mansur dan seluruh pengurus pusat dan daerah Daarul Qur'an Group di seluruh Indonesia.
7. Bambang Suherman selaku Ketua Forum Zakat Nasional periode 2018-2024 Forum Zakat Nasional dan seluruh pengurus harian Forum Zakat Nasional.
8. Bapak Doso Sutrisno selaku Ketua FOZ Wilayah Jawa Tengah dan Bapak Hendy Nurrochmansyah selaku pengurus harian FOZ Wilayah Jawa Timur.
9. Bapak Kuntarno Noor Aflah, selaku senior praktisi filantropi Islam.

Kami selaku penulis mengakui masih banyak kekurangan dalam tulisan hasil laporan penelitian tesis ini, kami berharap banyak masukan untuk perbaikan-perbaikan yang konstruktif atas nama ilmu pengetahuan. Bagi para pembaca, kami berikan kebebasan untuk menafsirkan dan merefleksikan apapun yang didapat dari hasil penulisan laporan penelitian ini. Silahkan menikmati dan menilai seperti apa adanya. Semoga bermanfaat. Salam budaya.

Yogyakarta, Juli 2022

Maulana Kurnia Putra, S.Sos.

## MOTTO

“... Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata.

Inilah sajakku pamflet masa darurat.

Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan.  
Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan.”

(WS. Rendra)

“Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan”

(Soe Hok Gie)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Untukmu yang mendekapku dari tapal batas langit biru, Mama

Untukmu yang mengisahkanku di sekian pesisir, Papa

Untukmu para perempuanku, Rofi, Khumaira, dan Kayla

Untukmu para penggerak zakat di Indonesia



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Pernyataan Keaslian</b> .....	ii
<b>Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme</b> .....	iii
<b>Halaman Pengesahan Tugas Akhir</b> .....	iv
<b>Nota Dinas Pembimbing</b> .....	v
<b>Abstrak</b> .....	vi
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>Motto</b> .....	viii
<b>Persembahan</b> .....	ix
<b>Daftar Isi</b> .....	x
<b>Daftar Tabel</b> .....	xv
<b>Daftar Gambar</b> .....	xvi
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
1. Studi Kasus Gerakan Filantropi Islam di Yordania dan Indonesia ...	11



2. <i>Faith Based Organization</i> (FBO) di Negara Maju dan Negara Berkembang .....	15
3. Filantropi Islam: Istilah dan Konteks Sosialnya .....	23
4. Kontestasi Peranan Filantropi Islam: Antara Negara dan Sipil .....	25
5. Studi Kasus Manajemen Kolaborasi di Pelbagai Negara .....	30
E. Kerangka Teoritis .....	36
F. Metode Penelitian .....	44
G. Sistematika Pembahasan .....	46
<b>BAB II Filantropi Islam: Dinamika Politik Hingga Respon Pandemi COVID-19</b> .....	<b>48</b>
A. Forum Zakat Nasional (FOZ): Sejarah dan Perkembangannya .....	48
B. LAZ dan BAZ dalam Tinjauan Sosiologis dan Yuridis .....	53
C. Latar Belakang Kolaborasi Program Selama Pandemi COVID-19 .....	58
<b>BAB III Manajemen Kolaborasi Forum Zakat (FOZ) Nasional Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia</b> .....	<b>62</b>
A. Kerja Kolaborasi Sektor Ketiga Filantropi Islam Pada Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021 .....	62
1. Intervensi Program Bidang Kesehatan .....	67
2. Intervensi Program Bidang Ketahanan Pangan .....	77
3. Intervensi Program Bidang Pemulihan Ekonomi .....	82
B. Dari Sebaran Program Menjadi Klaster Hingga Kompartemen Program .....	88

C. Pandemi COVID-19 Membuka Kolaborasi Antar Sektor: Negara, Perusahaan Swasta, dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) .....	99
D. Prinsip dan Karakteristik Manajemen Kolaborasi Forum Zakat Merespon Pandemi COVID-19 .....	103
<b>BAB V Penutup</b> .....	115
A. Simpulan .....	115
B. Rekomendasi Strategis dan Praktis .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	124
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	129

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Model Kajian <i>Collaborative Governance</i> Kirk Emerson, Nabatchi, dan Balogh.....	35
Tabel 2	Daftar Program Layanan COVID-19 Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia .....	68
Tabel 3	Ranking Program Respon COVID-19 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Anggota Forum Zakat.....	73
Tabel 4	Nomor Kontak Hotline Layanan COVID-19 Anggota Forum Zakat.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Zakatgrafik Sebaran Wilayah Respon COVID-19 Forum Zakat .....	76
Gambar 2	Data Stok Beras Anggota Forum Zakat untuk Kluster Ketahanan Pangan .....	79
Gambar 3	Zakatgrafik Kolaborasi Kurban Masa Pandemi Forum Zakat .....	81
Gambar 4	Gerakan Zakat Nasional dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi COVID-19 .....	86
Gambar 5	Tahapan Pembentukan Kompartemen Kolaborasi Forum Zakat .....	92
Gambar 6	Portofolio Visi Gerakan Zakat di Indonesia oleh Forum Zakat .....	94
Gambar 7	Desain Strategis Kompartemen Kolaborasi Forum Zakat ..	95
Gambar 8	Skema Kompartemen Kolaborasi Gerakan Zakat .....	95
Gambar 9	Karakteristik Kompartemen Kolaborasi Forum Zakat .....	106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kondisi masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19 yang mengalami kerentanan dan krisis melatarbelakangi bergeraknya aktor-aktor non negara untuk melakukan program-program darurat kebencanaan melalui gerakan zakat atau filantropi Islam. Pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi peristiwa bencana luar biasa yang membutuhkan sinergitas semua pihak, termasuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai salah satu kekuatan sosial.

Menurut Nana Sudiana, Sekretaris Jendral Forum Zakat (FOZ) periode 2019-2021, krisis multidimensi karena pandemi COVID-19 secara umum berdampak pada tiga dimensi sekaligus. Pertama, efek psikologis seperti kepanikan dan ketakutan terhadap orang. Kedua, dampak fisik membuat tubuh rentan terhadap infeksi, terutama saat bekerja. Ketiga, dampak finansial seperti biaya tak terduga untuk membeli produk pembersih atau alat pelindung diri (APD) untuk para tenaga kesehatan. Dampak lanjutan lainnya seperti berkurang hingga hilangnya pekerjaan dan pendapatan keluarga terutama yang mengandalkan pendapatan harian di sektor informal dan pedagang kecil karena pemberlakuan pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nana Sudiana, "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Lembaga Zakat di Tengah Krisis," *Minanews.net*, 23 Agustus 2020, <https://minanews.net/optimalisasi-pengelolaan-keuangan-lembaga-zakat-di-tengah-krisis-oleh-nana-sudiana-sekjend-foz-direksi-izi/>

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Dalam waktu singkat, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan tidak dapat memiliki pekerjaan tetap. Kemiskinan juga melonjak, dari 24,8 juta (9,22%) pada September 2019 menjadi 27,6 juta (10,19%) pada September 2020.<sup>2</sup> Data serupa juga diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa kemiskinan selama pandemi COVID-19 telah menciptakan kenaikan angka kemiskinan sebanyak 1,13 juta jiwa di seluruh Indonesia.<sup>3</sup> Selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021, Forum Zakat (FOZ) telah mengelola program-program intervensi di bidang kesehatan, kemiskinan, dan pemulihan ekonomi melalui kekuatan masyarakat sipil dengan kerja-kerja filantropi Islam.

Dalam situasi pandemi yang berdampak pada sisi sosial ekonomi inilah gerakan-gerakan filantropi Islam ikut memberi andil. Sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2011, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi salah satu garda terdepan untuk melakukan berbagai program sosial, ekonomi, dan pemberdayaan yang berdampak secara langsung ke masyarakat sasaran.

Tesis ini berusaha mengkaji upaya dan peran aktor non negara yaitu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di bawah Forum Zakat (FOZ) sebagai *faith-based organization* (FBO) selama pandemi COVID-19 di Indonesia beserta

---

<sup>2</sup> Bambang Suherman, "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat di Masa Pandemi," *Republika Online*, 3 Juni 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qu41eu423/optimalisasi-peran-lembaga-amil-zakat-di-masa-pandemi>

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen," *Badan Pusat Statistik*, 15 Februari 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>

kerja kolaborasi antar aktor dan hubungannya dengan peran negara dalam situasi darurat bencana. Diskusi akademik tentang peran kolaborasi aktor non negara berbasis keagamaan dan kerja kolaborasi masyarakat sipil atau sektor ketiga dapat dikaji pada makalah para ahli sebelumnya seperti Gaillard dan Texier; Regnerus; Taylor, Onyx, dan Mayo; Bruinessen; Appadurai; dan Benthall.

Gaillard dan Texier pun menjelaskan bahwa organisasi berbasis keyakinan (*faith-based organization*) berperan dalam mengurangi resiko sebuah bencana. Kelompok-kelompok keagamaan biasanya lebih terintegrasi ke dalam komunitas lokal dan biasanya dapat merespon kebencanaan dalam waktu singkat.<sup>4</sup> Menurut Regnerus, agama bisa menjadi cara bagi organisasi untuk mendorong keterikatan pada masyarakat sehingga mau berkomitmen secara sukarela.<sup>5</sup>

Studi oleh Taylor, Onyx, dan Mayo tentang organisasi sektor ketiga di Inggris mendukung asumsi ini. Pernyataan ini tidak menafikan “kemerdekaan” organisasi masyarakat sipil. Sebaliknya, pemerintah/negara mengklaim sebagai pendukung dan mitra gerakan sosial yang dipimpin oleh organisasi sektor ketiga. Misalnya, organisasi masyarakat sipil/sektor ketiga dapat bekerja dengan pemerintah pada tingkat praktis sesuai dengan prinsip subsidiaris, dan

---

<sup>4</sup> JC. Gaillard dan P. Texier, “Religions, Natural Hazards, and Disasters: An Introduction,” *Religion* Vol. 40, (2010): 81-84.

<sup>5</sup> MD. Regnerus, “Religion and Positive Adolescent Outcomes: A Review of Research and Theory,” *Review of Religious Research* 44, No. 4 (2003): 401.

kerjasama dengan sektor swasta dapat bekerja sesuai dengan hubungan saling menguntungkan.<sup>6</sup>

Bruinessen menjelaskan bahwa masifnya peran aktor non-negara tampaknya sangat dipengaruhi oleh klaim bahwa negara tidak lagi mampu mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan baik. Sistem neoliberalisme diduga berperan dalam gejolak di bidang ekonomi, sosial, dan politik, sehingga mengakibatkan krisis yang memperlebar jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Di tengah gejolak neoliberalisme yang semakin berkembang, negara tidak memperhatikan kelas menengah ke bawah, sehingga pada akhirnya peran ini diambil oleh pihak swasta untuk memberikan kesejahteraan kepada kelas bawah. Beberapa aktor non-negara seperti *Muslim Relief* dan *Muslim Aid* pun terlibat aktif dalam merespon isu-isu kebencanaan dan tanggap darurat.<sup>7</sup>

Appadurai pun menuliskan tentang gerakan masyarakat sipil oleh *SPARC*, *the National Slum Dwellers Federation*, dan *Mahila Milan* yang mampu melakukan kerja pengentasan kemiskinan di India melalui kekuatan lokal dan komunal masyarakat miskin perkotaan yang pada akhirnya dapat menunjukkan jaringan dan peranannya di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Menurutnya, kekuatan lokal berperan dalam pengentasan kemiskinan perkotaan telah memberikan dorongan kuat dalam proses

---

<sup>6</sup> Marilyn Taylor, Jenny Onyx, dan Marjorie Mayo, *Challenging The Third Sector: Global Prospects For Active Citizenship*, (Cambridge: Policy Press, 2015).

<sup>7</sup> Martin van Bruinessen, dalam pewacana Hilman latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), xi.



demokratisasi oleh aktor non negara sehingga dapat menghadirkan visi pasca-Marxis dan pasca-developmentalists tentang gerakan lokal dan global yang dapat menjadi instrumen timbal balik untuk pendalaman demokrasi yang berasal dari bawah.<sup>8</sup>

Benthall menjelaskan, aktor non-negara muncul karena negara tidak bisa menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Benthall juga menjelaskan bahwa aktor non-negara lebih efektif dalam memberikan pelayanan kesejahteraan, seperti yang terjadi di Mesir. Banjir bandang di Mesir pada tahun 1994 menunjukkan respon pemerintah dan negara yang lambat dan tidak efektif. Sementara itu, organisasi Ikhwanul Muslimin dan beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya telah mengambil langkah cepat dan efektif untuk membantu korban banjir yang terjadi.<sup>9</sup>

Cihan Tugal menjelaskan peran aktor non-negara dan filantropi Islam berbasis komunitas dan pasar dalam gerakan filantropi Islam. Lembaga filantropi modern yang berbasis pasar mendistribusikan kesejahteraan sosial dengan proses kelembagaan, program terstruktur, secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Sedangkan filantropi berbasis komunitas mengutamakan aspek kesukarelaan, kecepatan, dan jangka pendek.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Arjun Appadurai, "Deep Democracy: Urban Governmentality and the Horizon of Politics", *Environment & Urbanization*, Vol. 13, No. 2 (2001), 23-43.

<sup>9</sup> Jonathan Benthall, "Financial Worship: the Quranic Injunction to Almsgiving", *the Journal of the Royal Anthropological Institute*, Vol. 5, No. 1 (1999), 27-42.

<sup>10</sup> Cihan Tugal, "Contesting Benevolence: Market Orientations Among Muslim Aid Providers in Egypt", *Qualitative Sociology* 36, No. 2 (2013), 141-159.

Untuk mengkaji peran organisasi pengelola zakat yang berkolaborasi antar sesamanya selama pandemi COVID-19 oleh lembaga filantropi modern pada tesis ini, pandangan Tugal ini pun dikuatkan oleh Anderson yang berpendapat bahwa kolaborasi berdurasi lebih panjang daripada sinergi. Juga proses interaksi berkelanjutan oleh banyak orang. Kegiatan kolaborasi membutuhkan perencanaan yang matang secara kolektif dalam rangka menanamkan rasa tanggung jawab bersama, sehingga implementasi kolaborasi tersebut berjalan dengan baik.<sup>11</sup>

Pada konteks peran lembaga filantropi Islam di Indonesia, beberapa kajian telah dilakukan oleh Fauzia<sup>12</sup>, Latief<sup>13</sup>, dan Sakai<sup>14</sup>. Fauzia memaparkan bahwa aktor non-negara dalam gerakan filantropi Islam dapat bisa menggantikan peran negara. Fauzia percaya bahwa gerakan masyarakat sipil lebih kuat ketika negara berada dalam posisi yang lebih lemah. Sebaliknya, peran negara yang kuat akan melemahkan gerakan masyarakat sipil dan aktor non-negara. Fauzia juga mengutip pandangan Mike W. Martin bahwa filantropi dapat diklasifikasikan menjadi empat komponen: sukarela, swasta (non-pemerintah), layanan atau tindakan komunitas, dan kepentingan publik.<sup>15</sup> Dinamika gerakan filantropi Islam yang didominasi oleh kekuatan sipil pun sering terjadi tarik ulur kepentingan dan kontestasi yang memunculkan dilema,

---

<sup>11</sup> ET. Anderson, dan J. Mc Farlane, *Community as Partner Theory and Practice in Nursing 4th Edition*, (Philadelphia: \_\_\_\_\_, 2004).

<sup>12</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading, 2016).

<sup>13</sup> Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Ombak, 2013).

<sup>14</sup> Minako Sakai, *Muslimah, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018).

<sup>15</sup> Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah*, 17.

dimana negara tidak ingin kehilangan perannya, di sisi lain organisasi pengelola zakat menginginkan misinya tercapai.<sup>16</sup>

Latief berpendapat bahwa aktor filantropi Islam non-negara akan muncul ketika negara tidak dapat memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Krisis moneter tahun 1998 di Indonesia menyebabkan negara tidak mampu memenuhi kesejahteraan rakyatnya dengan baik karena harus bertahan dalam gejolak ekonomi, sosial, dan politik. Aktor non negara bermunculan dan menguat perannya menyediakan kebutuhan masyarakat, pelayanan kesehatan, hingga bantuan uang tunai secara cepat.<sup>17</sup>

Sakai juga menyebutkan bahwa aktor non-negara muncul dengan harapan dapat berkolaborasi dengan negara untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pada akhirnya, aktor non-negara mengambil peran negara dengan menyalurkan dana filantropi Islam untuk mengatasi kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.<sup>18</sup>

Di antara pendapat-pendapat para ahli di atas terkait dinamika peran aktor non negara dan gerakan filantropi Islam dalam wacana distribusi kesejahteraan kepada masyarakat serta ketidakmampuan negara dalam melakukan peranannya, Azyumardi Azra memberikan pendapat yang cukup menarik dalam artikelnya bertajuk *Negara dan Filantropi Islam*.<sup>19</sup> Azra berpendapat bahwa kontestasi antara negara dan filantropi Islam akan terus

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Latief, *Politik Filantropi Islam*

<sup>18</sup> Sakai, *Muslimah, Kewirausahaan, dan*, 9.

<sup>19</sup> Azyumardi Azra, "Negara dan Filantropi Islam," *Panrita.id*, 28 Januari 2019, <https://panrita.id/2019/01/28/negara-dan-filantropi-islam/>.

mewarnai sejarah filantropi Islam Indonesia hari ini dan masa datang. Keadaan seperti ini jelas terlihat di masa silam. Kontestasi tersebut jelas banyak terkait dengan hal hubungan dan peran negara dalam filantropi Islam. Azra pun masih mengutip pendapat Amelia bahwa terdapat kontestasi di antara tiga kelompok besar umat dalam kaitannya dengan posisi negara tersebut. Pertama, kalangan umat atau lembaga Islam yang mendukung kontrol negara terhadap filantropi Islam. Kedua, mereka yang menentang campur tangan dan institusionalisasi filantropi oleh negara. Ketiga, mereka yang ingin memelihara filantropi tetap berada di tangan aktor-aktor non-negara, tetapi pada saat yang sama menuntut dukungan negara.

Tesis ini berargumen bahwa selama pandemi COVID-19 pada 2020-2021 di Indonesia, peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai aktor non negara dalam filantropi Islam telah menguat dengan melakukan kerja kolaborasi inter dan antar sektoral: negara, swasta, dan sipil. Meskipun dalam perjalanannya, antara negara dan aktor non negara masih terdapat ruang kontestasi, namun kerja kolaborasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di bawah Forum Zakat dianggap menguat dan dikonsolidasikan sebagai respon masa darurat pandemi COVID-19 untuk saling membantu memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Kerja kolaborasi inter dan antar sektor yang diinisiasi oleh Forum Zakat inilah yang menjadi perhatian penulis untuk mengisi ruang diskusi gerakan filantropi Islam di Indonesia untuk melihat dinamika kontestasi dan kolaborasi ketika berhadapan pada masa darurat kebencanaan, terlebih pada masa darurat pandemi COVID-19.

Untuk mengkaji kerja kolaborasi Organisasi Pengelola Zakat atau aktor non negara melalui gerakan filantropi Islam serta peranan antar sektor, penelitian ini mengambil studi kasus pada manajemen kolaborasi Forum Zakat sebagai asosiasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di skala nasional, Forum Zakat Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, beberapa sampel OPZ, pelaku filantropi Islam, dan *stake-holder* di Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Beberapa informan dan data yang diteliti diletakkan dalam diskursus manajemen kolaborasi yang dilakukan OPZ di bawah Forum Zakat sebagai gerakan sipil atau aktor non negara selama pandemi COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020-2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian “Kolaborasi Filantropi Pada Pandemi COVID-19: Studi Manajemen Kolaborasi Gerakan Zakat Merespon Dampak Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen kolaborasi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang dilakukan oleh Forum Zakat (FOZ) untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kolaborasi program anggotanya pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020-2021?
2. Bagaimana peran aktor non negara melalui kolaborasi Forum Zakat untuk membantu negara dalam kedaruratan bencana selama pandemi COVID-19 tahun 2020-2021?

3. Bagaimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai aktor non negara membangun kerja kolaborasi antar sektor selama pandemi COVID-19 tahun 2020-2021?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian “Kolaborasi Filantropi Pada Pandemi COVID-19: Studi Manajemen Kolaborasi Gerakan Zakat Merespon Dampak Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021” dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan manajemen kolaborasi oleh Forum Zakat pada pandemi COVID-19 tahun 2020-2021, menganalisis kepentingan dan kebutuhan organisasi tentang optimalisasi peran, klasifikasi kebutuhan masyarakat, dan menentukan strategi Forum Zakat melalui pendekatan manajemen kolaborasi.
2. Memberikan kontribusi keilmuan dalam kajian filantropi Islam di tengah krisis melalui pendekatan manajemen dan pekerjaan sosial dengan memberikan deskripsi kerja kolaborasi antar sektor yaitu negara, swasta, dan masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi pengelola zakat dalam merespon dampak pandemi COVID-19.
3. Secara kualitatif dapat mendeskripsikan pengelolaan kolaborasi jaringan-jaringan sosial antar sektor: negara, swasta, dan sipil sehingga filantropi Islam menjadi modal sosial yang memberikan

manfaat secara langsung, kompak, dan berdampak kepada masyarakat sasaran penerima manfaat terlebih pada masa kedaruratan bencana.

#### **D. Kajian Pustaka**

##### **1. Studi Kasus Gerakan Filantropi Islam di Yordania dan Indonesia**

Egbert Harmsen mengkaji peranan kerja sosial aktor non negara atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) Muslim di Yordania. Gerakan-gerakan lembaga swadaya masyarakat Islam di Yordania menerjemahkan visi mereka tentang pesan Islam sebagai fondasi kokoh yang menawarkan jawaban atas semua masalah kehidupan ke dalam berbagai aktivitas dakwah agama, control sosial, aktivitas politik, dan kerja sosial yang terorganisir.<sup>20</sup>

Harmsen pun menganalisis fungsi politik yang sebenarnya dari LSM-LSM tersebut akan dianalisis dengan melihat hubungannya dengan negara. Menurutnya, LSM Islam tidak berkonfrontasi dengan negara. LSM lebih berfungsi sebagai pilar sistem negara yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Pada tahun 1999, 82,7% dari semua asosiasi kesejahteraan sukarela menawarkan beberapa jenis layanan yaitu membantu keluarga miskin, anak yatim dan siswa yang membutuhkan, pelatihan kejuruan terutama bagi perempuan muda, mendirikan Taman Kanak-Kanak, memecahkan masalah sosial dan perbedaan dalam keluarga dan komunitas lokal, memberikan edukasi kesadaran, layanan pendidikan dan Kesehatan.

---

<sup>20</sup> Egbert Harmsen, *Islam, Civil Society and Social Work: Muslim Voluntary Welfare Associations in Jordan Between Patronage and Empowerment*, (Leiden: Amsterdam University Press, 2008), 67-409.



Oleh karena itu, di Yordania, banyak asosiasi yang didirikan atas dasar keluarga, klan, suku atau (asli atau asli) desa melakukan beberapa kegiatan yang disebutkan di atas untuk melayani kelompok sosial mereka sendiri. Dengan memberikan layanan ini, ukuran kontribusi terhadap kohesi dan harmoni sosial, dan pencegahan kerusuhan sosial, disintegrasi dan kejahatan dicapai oleh asosiasi ini. Dalam pengertian ini, kegiatan LSM-LSM tersebut, serta nilai-nilai sosial yang menyertainya (berwawasan agama) sesuai dengan kepentingan negara dan masyarakat untuk memberikan identitas, sistem keadilan, harapan dan solidaritas komunal serta rasa aman.

Retsikas menuliskan tentang peran lembaga amil zakat (LAZ) atau organisasi pengelola zakat (OPZ) modern di Indonesia terbentuk pada beberapa tahun terakhir pemerintahan Orde Baru (1966-1998), atau segera setelahnya, dan benar-benar aktif pada masa reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang. Di era pasca-Orde Baru, zakat secara alternatif dipahami sebagai transfer bantuan keuangan kepada orang miskin dan miskin, terutama pada saat kehidupan mereka lumpuh oleh krisis ekonomi dan politik yang dihadapi negara pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Wacana filantropi mengunggulkan penegakan keadilan sosial bukan dengan menjadikan zakat sebanding dengan kewajiban yang dipungut oleh negara, tetapi dengan menjadikan zakat setara dengan pemberian hadiah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Konstantinos Retsikas, *A Synthesis of Time: Zakat, Islamic Micro-finance and the Question of the Future in 21<sup>st</sup> Century Indonesia*, (Switzerland: Springer, 2020), 37-54.

Fauzia, Hidayati, Ilmiah, dan Garadian menuliskan bahwa sebaran ide dan praktik baik di tingkat individu dan lembaga sudah mengarah pada praktik filantropi yang berkeadilan sosial, meskipun belum menjadi arus utama. Menurutnya, masih dibutuhkan standar untuk kerja penuntasan kemiskinan, program pemberdayaan, pendekatan inklusif, dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Konteks gerakan filantropi Islam di Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara lain karena konteks sosial-politik, ekonomi, dan agama yang berbeda. Pada kesimpulan laporan penelitiannya, dijelaskan bahwa keterhubungan dan keterbukaan dengan keragaman di pelbagai lapisan masyarakat baik wacana, aktor, dan wilayah, merupakan basis penting untuk percepatan dan penguatan filantropi Islam yang berkeadilan sosial.<sup>22</sup>

Menjembatani antara kajian pustaka antara peran organisasi pengelola zakat atau FBO yang ada, Fitri dan Jauhari menuliskan bahwa peranan organisasi pengelola zakat ketika dihadapkan pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) maka dapat terlihat pola yang bergeser dari peran masyarakat sipil. Dimana sebelumnya aktor-aktor non negara atau kekuatan sipil yang berhadapan dengan peranan negara maupun perusahaan, bergeser ke arah kerja kolaboratif dengan instrument negara dan perusahaan swasta.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Amelia Fauzia, Sri Hidayati, Emi Ilmiah, dan Endi Aulia Garadian, *Laporan Hasil Penelitian Fenomena Praktik Filantropi Masyarakat Muslim dalam Kerangka Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

<sup>23</sup> Meila Riskia Fitri dan Putri Rima Jauhari, "Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Perusahaan dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia," *Jurnal Resiprokal* Vol. 2, No. 2 (2020): 192-199.

Merujuk pada *The Importance of Social Capital for Faith Based Organizations in the New Normal Adaptation of West Sumatera*<sup>24</sup>, dalam menghadapi bencana, agama sangat penting dalam memandu perilaku masyarakat untuk lebih bersabar dan tangguh. Gaillard dan Texier pun menjelaskan bahwa organisasi berbasis keyakinan (*faith-based organization*) berperan dalam mengurangi resiko sebuah bencana. Kelompok-kelompok keagamaan biasanya lebih terintegrasi ke dalam komunitas lokal dan biasanya dapat merespon kebencanaan dalam waktu singkat.<sup>25</sup>

Permata, Nanda, dan Dermawan juga mengutip bahwa agama mempertimbangkan satu hal yang membuat seseorang mampu menghadapi bencana. Dan organisasi berbasis keagamaan (*faith-based organization*) berbicara dengan menggunakan bahasa lokal, memahami kebudayaan lokal, dan mengetahui kelompok mana saja yang rentan dalam menghadapi bencana. Organisasi berbasis keagamaan memainkan peranan penting dalam membangun jaringan sebelum dan setelah terjadinya bencana. Seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang berpartisipasi dalam menangani pandemi COVID-19.<sup>26</sup>

Di Sumatera Barat, agama sebagai modal sosial masyarakat sangat dekat posisinya dengan komunitas lokal karena memiliki kesamaan yaitu

---

<sup>24</sup> Inda Mustika Permata, Bima Jon Nanda, dan Rifki Dermawan, "The Importance of Social Capital for Faith Based Organizations in the New Normal Adaptation of West Sumatera," *Islam Realitas* Vol. 7, No. 1 (2021): 16-28.

<sup>25</sup> Gaillard dan. Texier, *Religions, Natural Hazards*, 81-84.

<sup>26</sup> Permata, Nanda, dan Dermawan, *The Importance of*, 16-28.

Islam sebagai identitas kesukuan. Oleh karena itu, organisasi berbasis keagamaan (*faith-based organization*) merupakan modal sosial yang dapat menciptakan ketahanan sosial terhadap COVID-19 di Sumatera Barat, khususnya dalam adaptasi masa kebiasaan normal baru (*new normal*). Sebab, menurut Regnerus, agama bisa menjadi cara bagi organisasi untuk mendorong keterikatan pada masyarakat sehingga mau berkomitmen secara sukarela.<sup>27</sup>

## **2. *Faith Based Organization* (FBO) di Negara Maju dan Negara Berkembang**

### **a. *Faith Based Organization* (FBO) di Eropa Barat dan Timur**

Dinamika sosial masyarakat di seluruh belahan dunia selalu memberikan tantangan dan masalah yang memunculkan berbagai aksi pelayanan sosial dari berbagai pihak, termasuk salah satunya dari organisasi-organisasi berbasis keyakinan atau *Faith-Based Organization* (FBO). Pandemi COVID-19 sejak awal 2020 mengakibatkan permasalahan global yang juga memberikan ruang bertumbuh banyak FBO yang juga berbasis komunitas atau akar rumput (*community-based organization/CBO*) dengan karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan wilayahnya.

Glatzer dan Manuel menjelaskan karakteristik FBO yang ada di setiap wilayah akan berbeda berdasarkan beberapa hal yaitu jenis

---

<sup>27</sup> Regnerus, *Religion and Positive*, 401.

jemaat, tingkat demokratisasi, jenis negara kesejahteraan, dan kerentanan terhadap krisis ekonomi 2008. Di wilayah Eropa Barat, Glatzer dan Manuel mengambil sampel dari negara Irlandia, Italia, Spanyol, Portugal, Yunani, Swedia, Inggris, dan Yunani. Sedangkan di Eropa Timur adalah Rusia, Ukraina, Polandia, Rumania, Croasia, Slovenia, Hungaria, Republik Ceko, dan Estonia.<sup>28</sup>

Di Eropa Barat, Glatzer dan Manuel menjelaskan bahwa pertama, ukuran FBO yang terlibat dalam pemberian layanan sosial sangat besar. Di Spanyol, FBO yang ada memberikan bantuan di lokasi-lokasi pelayanan sosial kepada satu juta orang selama resesi pada tahun 2012. Pada tahun 2015, Periklis Polyzoidis mencatat bahwa Gereja Ortodoks Yunani melayani sekitar 1,2 juta orang, hampir 10 persen dari populasi Yunani. Ugo Ascoli dan Marco Arlotti mengamati bahwa organisasi-organisasi Katolik yang berafiliasi di Italia mengoperasikan lebih dari 4.000 program pelayanan kesehatan dan sosial yang dijalankan oleh 420.000 pekerja, banyak dari mereka adalah sukarelawan. FBO Katolik dan Protestan di Jerman merupakan pemberi kerja terbesar kedua yang hanya dilampaui oleh peran negara itu sendiri. Sedangkan FBO berbasis amal terbesar di Irlandia adalah *Saint Vincent de Paul Society*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Miguel Glatzer, Paul Christopher Manuel, *Faith-Based Organizations and Social Welfare Associational Life and Religion in Contemporary Western Europe*, (New York: Palgrave Macmillan, 2019).

<sup>29</sup> *Ibid.*, 1-16.

Kedua, meski penting, peran pendanaan negara bervariasi antar kasus dan tidak selalu dominan. Sementara dua pertiga anggaran Cáritas di Jerman yang berasal dari negara bagiannya, melalui sektor publik menyumbang lebih dari seperempat anggaran Cáritas di Spanyol. Tren pendanaan negara juga bervariasi. Di beberapa negara, negara kesejahteraan (*welfare state*) tetap menekankan program seperti pensiun atau asuransi pengangguran, sementara di lain layanan sosial dan pribadi memiliki sejarah yang lebih panjang. Penghematan, baik yang dipaksakan secara eksternal atau didorong secara internal, berarti pemotongan substansial dalam anggaran layanan sosial atau sedikit peningkatan tetapi tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan yang meningkat. Akhirnya, di beberapa negara, program baru atau perluasan program yang ada menghasilkan aliran uang publik baru (seperti dalam kasus Jerman tentang peningkatan subsidi federal untuk penitipan anak dan pengasuhan orang tua). Sumber dana negara juga beragam, dalam beberapa kasus (misalnya, Yunani), pendeta adalah pegawai negeri, dibayar oleh negara. Beberapa negara bagian mengizinkan individu untuk mengalokasikan sebagian dari pajak penghasilan mereka ke gerejanya. Di negara lain, bentuk pendanaan negara yang dominan terjadi melalui alokasi kontrak untuk layanan kesejahteraan.

Ketiga, negara bervariasi dalam tingkat variasi regional internal dalam kapasitas organisasi berbasis agama untuk menyediakan layanan sosial. Sementara Gereja Ortodoks Yunani menyediakan layanan

bahkan di desa-desa dan pulau-pulau terpencil, seperti juga kasus Gereja Katolik Roma di Portugal, Spanyol dan Italia ditandai oleh tingkat variasi internal yang substansial. Menariknya, variasi tersebut berkorelasi buruk dengan perbedaan regional dalam religiusitas. Sebaliknya, perbedaan kapasitas untuk merespon kebutuhan lokal berasal dari perbedaan aliran pendanaan (daerah yang lebih miskin memiliki kebutuhan yang lebih tinggi tetapi kapasitas yang lebih rendah untuk berkontribusi) maupun kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan kesediaan mereka untuk bermitra secara efektif dengan organisasi sektor ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Italia Utara dan Tengah berkinerja lebih baik pada dimensi ini daripada Italia Selatan. Di Spanyol, wilayah Basque dan Barcelona menunjukkan baik sumber daya dan kapasitas untuk bermitra dengan organisasi berbasis agama, sementara Madrid tidak melakukannya.

Keempat, perhatian gereja kepada orang miskin dan yang paling rentan mendapat tanggapan positif dari opini publik. Dalam beberapa kasus jauh melebihi tingkat persetujuan untuk hirarki gereja. Seperti yang dikemukakan Michelle Dillon, di era yang ditandai dengan skandal dan perasaan bahwa gereja sering tidak tersentuh di Irlandia, dan bahkan di seluruh Eropa Barat. Meskipun demikian, gereja menghadapi tekanan di beberapa tempat dari cara mereka mengoperasikan fungsi pelayanan sosialnya.



Kelima, di mana pendanaan negara adalah sumber yang dominan, seperti di Jerman, negara bisa dibilang membuat kontrak dengan organisasi sektor ketiga sekuler untuk menyediakan layanan. Dalam kasus lain, di mana masyarakat sipil atau sektor ketiga masih relatif lemah dan di mana negara memainkan peran yang relatif sederhana, hilangnya organisasi berbasis agama kemungkinan besar akan memiliki efek yang sangat besar.

Di Eropa Timur, Glatzer dan Manuel memperingatkan agar tidak mengadopsi model pembangunan linier menuju satu bentuk modernitas, dengan Eropa Barat sebagai paradigma dan sekularisasi masyarakat sebagai hasilnya.<sup>30</sup> Pandangan umum tentang Eropa Barat sebagai negara sekuler adalah generalisasi yang terlalu luas yang mengabaikan variasi substansial di antara negara-negara serta reservoir kepercayaan yang dalam. Dalam upaya melawan dominasi pengalaman Eropa Barat sebagai lintasan paradigmatik, beberapa bab secara menarik berargumen bahwa Eropa Timur, setidaknya dalam beberapa hal di mana modernitas telah mencakup tingkat religiusitas yang lebih tinggi.

Kedua, Eropa Timur mencolok dalam variasinya dalam hal religiusitas. Meskipun mencakup dua negara yang secara rutin diperingkatkan sebagai yang paling tidak beragama di dunia yaitu

---

<sup>30</sup> Miguel Glatzer dan Paul Christopher Manuel, *Faith-Based Organizations and Social Welfare Associational Life and Religion in Contemporary Eastern Europe*, (New York: Palgrave Macmillan, 2020), 1-11.

Republik Ceko dan Estonia, sebagian besar negara mengalami kebangkitan agama yang kuat setelah jatuhnya Komunisme. Kesenjangan generasi yang mengukur religiusitas kaum muda versus orang tua seringkali jauh lebih kecil daripada di Eropa Barat, menunjukkan bahwa negara-negara Eropa Timur dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi cenderung tidak melihat kejatuhan yang terjadi di sebagian besar Eropa Barat. Pada saat yang sama, banyak penulis menekankan bahwa meskipun keyakinan agama dan identifikasi dengan suatu agama sering kali lebih kuat daripada di Eropa Barat.

Ketiga, agama dapat menjadi kekuatan pemecah belah dalam masyarakat, menekankan perbedaan antar kelompok, mengunggulkan beberapa sebagai lebih sah daripada yang lain, dan menekankan faktor etnonasional. Agama juga bisa menjadi rekonsiliasi, menekankan kolaborasi, dialog dengan banyak pihak, dan menghormati martabat semua orang. Dalam masyarakat yang plural secara agama, di mana satu gereja secara erat diidentifikasi dengan negara dan bangsa, atau di mana migrasi baru-baru ini sebagian besar adalah Muslim, perbedaan antara sikap memecah belah dan rekonsiliasi ini menjadi semakin penting. Dalam beberapa kasus, gereja menekankan modal sosial yang mengikat (di antara anggota kelompok yang sama) daripada modal sosial yang menjembatani (di antara kelompok yang berbeda).

Keempat, gereja-gereja Eropa Timur memiliki keberhasilan politik yang jauh lebih besar dalam mempromosikan nilai-nilai konservatif tradisional daripada di Eropa Barat.

Kelima, di banyak negara gereja memainkan peran penting meski terbatas dalam menyediakan layanan bagi populasi rentan yang tidak terlayani dengan baik oleh sistem dukungan negara yang ada. Contohnya termasuk tunawisma, orang yang kecanduan narkoba, ibu dan anak yang kabur dari rumah karena kasus kekerasan dalam rumah tangga, pengungsi dan migran, dan orang dengan diagnosis ganda (seperti kecanduan narkoba dan penyakit mental). Namun, sejauh mana kegiatan ini dikoordinasikan atau diprioritaskan oleh hierarki gereja bervariasi. Dalam banyak kasus, inisiatif ini terjadi di tingkat paroki, menghasilkan variasi dalam cakupan. Pelayanan kerohanian di penjara dan di militer telah berkembang pesat dalam banyak kasus.

Akhirnya, kepercayaan pada gereja sebagai institusi sangat bervariasi. Meskipun demikian, kegiatan berbasis agama di bidang kesejahteraan dan pelayanan sosial umumnya mendapat persetujuan, meskipun pengetahuan tentang kegiatan ini tidak selalu tinggi.

Studi kasus di Eropa Barat menunjukkan variasi yang kaya dalam religiusitas, hubungan gereja-negara, dan tingkat keterlibatan gereja dalam kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, dari Lisbon hingga Moskow, mayoritas besar di sebagian besar negara memandang keterlibatan gereja dalam pemberian kesejahteraan sebagai hal yang

positif. Dalam periode di mana kepercayaan pada pemerintah dan gereja sedang jatuh, dan di mana kebutuhan orang-orang yang rentan hanya sebagian dipenuhi melalui program-program negara, bidang kegiatan ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan.

**b. *Faith Based Organization* (FBO) di Timur Tengah dan Asia Tenggara dengan Kekuatan Komunitas Keagamaan**

Bagi pekerja kemanusiaan di dunia nirlaba, Timur Tengah akan dilihat lebih kompleks. Misalnya pengiriman bantuan di Suriah yang dilanda perang di mana, PBB memperkirakan 7,6 juta orang mengungsi dan 4,6 juta orang membutuhkan bantuan di lingkungan yang terkepung dan daerah yang sulit dijangkau. Aktor kemanusiaan menavigasi kompleksitas politik setiap hari, melewati pos pemeriksaan dan wilayah faksi-faksi yang bersaing dan memerangi, saat mereka berusaha memberikan jalur bantuan bagi yang warga yang rentan.

Lembaga *Islamic Relief* bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah dan lembaga multilateral, dan telah beroperasi di lingkungan yang menantang selama lebih dari 30 tahun. Sebagai lembaga berbasis agama, "modal spiritual" membangun kepercayaan dan sering kali mendorongnya lebih dalam ke zona konflik daripada lembaga lain. Ini memungkinkan untuk menempa pertumbuhan dan menyebarkan wawasan di Timur Tengah, khususnya di zona konflik.

Namun, Pusat Masyarakat Sipil Internasional, sebuah platform yang berbasis di Berlin, dengan tepat menunjukkan bahwa sektor masyarakat sipil sedang menghadapi perubahan yang mengganggu. Ini tidak hanya berdampak pada kemanusiaan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan lembaga keuangan. Inti dari gangguan ini adalah pembiayaan. Sebuah laporan baru oleh lembaga Demos di Inggris, menemukan bahwa badan amal dan LSM semakin terpengaruh oleh undang-undang anti-terorisme. Hal ini menyebabkan bank-bank yang kurang peka terhadap risiko akan menutup rekening. Mentransfer uang ke tempat yang membutuhkan juga menjadi lebih sulit. menyimpulkan bahwa ini bisa merugikan badan amal Inggris karena biaya kepatuhan dan dana yang tidak ditransfer terikat di rekening domestik.

### **3. Filantropi Islam: Istilah dan Konteks Sosialnya**

Kedermawanan dalam Islam dalam hal ini zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf menjadi cukup populer selama pandemi COVID-19 belakangan ini. Dalam Rukun Islam, zakat menjadi salah satu pilar kesempurnaan keislaman seseorang yang memiliki dimensi ketaatan pada Tuhan dan dimensi kepedulian sosial sesama manusia dan lingkungannya. Praktik kedermawanan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf yang kini populer dengan istilah filantropi Islam bertumbuh dengan pesat dengan praktik individu, komunitas, hingga bertumbuhnya lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia. Amelia Fauzia menjelaskan kegiatan amal

sudah ada sejak lama. Sejarah mencatat praktik-praktik kedermawanan masa lalu, seperti keberadaan wakaf kitab, wakaf gandum yang telah dilakukan di Mekah dan Madinah sejak zaman Nabi Muhammad SAW..<sup>31</sup>

Praktik filantropi telah diatur dalam Islam sebab hal ini merupakan wujud dari salah satu Rukun Islam yang memiliki dimensi sosial. Islam mengajarkan nilai kesukarelaan dengan cara berbagi dengan orang lain dan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Kepedulian terhadap orang lain, mencintai sesama manusia, kesediaan untuk membantu mereka yang membutuhkan materi dan non-materi tanpa paksaan adalah kekuatan filantropi Islam.

Ruang publik kedermawanan masyarakat Indonesia yang dihadapkan pada situasi pandemi hari ini tidak lepas dari garis historisnya yang mengakar kuat dalam kebudayaan. Amelia Fauzia pun menuliskan tentang praktik filantropi sudah ada sejak masyarakat Hindu di Indonesia pada abad ketigabelas Masehi.<sup>32</sup> Kita harus memahami dua hal bahwa: ruang publik adalah sesuatu yang sangat cair, sedangkan kedermawanan adalah salah satu diskursus historis yang menjadi karakter budaya masyarakat Indonesia yang melampaui agama dan politik.

Peneliti menuliskan dalam *Ruang Publik Kedermawanan Hari Ini*<sup>33</sup> bahwa setelah Charity Aid Foundation (CAF) merilis tentang *Global Giving Index* (WGI) tahun 2020, kedermawanan masyarakat Indonesia menduduki

---

<sup>31</sup> Fauzia, . *Filantropi Islam: Sejarah*.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>33</sup> Maulana Kurnia Putra, "Ruang Publik Kedermawanan Hari Ini," *Times Indonesia*, 14 April 2022, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/405998/ruang-publik-kedermawanan-hari-ini>.

peringkat pertama mengalahkan Selandia Baru di posisi ketujuh yang dikenal memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Pandemi COVID-19 telah mengubah karakter kegiatan filantropi di Indonesia menjadi lebih kolaboratif antar Organisasi Pengelola Zakat. Sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia, respon bersama dari pelbagai organisasi filantropi Islam melalui Forum Zakat telah memberikan kontribusi besar pada masalah sosial kemasyarakatan.

Citra Widuri menjelaskan konsep *connecting the dots* (menghubungkan titik-titik) dalam praktik filantropi Islam di Indonesia. Sudah banyak praktik zakat yang bisa menjadi pengetahuan yang harus dihubungkan untuk menjadi pengalaman (*experience*) dalam literasi gerakan zakat di Indonesia.<sup>34</sup>

#### **4. Kontestasi Peranan Filantropi Islam: Antara Negara dan Sipil**

Kita sering dihadapkan pada pertanyaan, siapakah penggerak yang paling otoritatif dan dapat diandalkan di balik filantropi Islam Indonesia. Pada tingkat bangsa atau masyarakat ada pertanyaan tentang bagaimana filantropi ini dapat memainkan peran yang lebih efektif. Melalui analisis otoritas dan kredibilitas pertanyaan ini dapat dijawab. Istilah "otoritas" banyak berkaitan dengan masalah politik, legalitas, dan pengakuan amal sosial dari lembaga formal seperti negara. Konsep "kredibilitas," di sisi lain,

---

<sup>34</sup> MSKI UIN Syarif Hidayatullah, "Filantropi dalam Arus Sejarah Islam dan Relevansinya terhadap Dunia Profesional," *Magister Studi Kebudayaan Islam*, 7 Agustus 2021, <https://mski-fah.uinjkt.ac.id/index.php/2021/08/07/filantropi-dalam-arus-sejarah-islam-dan-relevansinya-terhadap-dunia-profesional/>.



mencakup kemampuan organisasi, akuntabilitas, dan kesadaran pemangku kepentingan.

Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tetapi tidak secara eksplisit menjadikan Islam sebagai dasar negara, gerakan filantropi dilakukan pemerintah dan organisasi amal Islam (baik non-pemerintah dan kuasi-pemerintah) yang diwarnai oleh sumber daya dari sektor ketiga yang menekankan pada peran masyarakat sipil.

Buku *Politik Filantropi Islam di Indonesia* membahas tiga hal, yaitu sifat organisasi sektor ketiga dalam kaitannya dengan sektor lain, potensi modal sosial masyarakat sipil dalam pengelolaan filantropi Islam, hubungan yang dibangun antara lembaga amal Islam "semi-pemerintah", non-pemerintah, dan negara.<sup>35</sup>

Dalam penyelenggaraan filantropi, sektor pertama merujuk pada organisasi negara atau pemerintah. Sektor pertama bertanggung jawab untuk melindungi komunitas mereka melalui berbagai langkah hukum dan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari segala macam masalah politik, sosial, dan ekonomi. Akses ke layanan sektor publik adalah hak setiap warga negara, dan merupakan tugas pemerintah untuk menyediakan dan mengelola layanan ini.

Sektor kedua adalah lembaga swasta dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi perusahaan yang meliputi usaha kecil, menengah, atau besar serta perusahaan swasta. Sektor ketiga diwakili oleh organisasi sosial

---

<sup>35</sup> Latief, *Politik Filantropi Islam*

atau organisasi nirlaba dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan sistem yang mandiri.

Organisasi sektor ketiga membangun kerjasama dengan masyarakat lokal untuk membangun demokrasi politik, sosial dan ekonomi, dan bekerja dengan sektor pertama atau kedua untuk merumuskan kebijakan filantropi. Pendirian sektor ketiga bersifat sukarela atau semi sukarela dan dilatarbelakangi oleh sistem nilai tertentu yang ada di masyarakat.

Ketiga sektor di atas sering berada dalam bidang dengan kepentingan yang sama, seperti program-program yang pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan proses yang partisipatif. Di sisi lain, Gemma Donnelly Cox, dan O' Regan mendefinisikan peran organisasi sektor ketiga untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan kebutuhan sosial yang baru, memelihara dan mengubah nilai-nilai sosial, menengahi antara individu dan negara, dan menyediakan ruang dan forum bagi individu untuk membangun institusi sosial.<sup>36</sup>

Studi oleh Taylor, Onyx, dan Mayo tentang organisasi sektor ketiga di Inggris mendukung asumsi ini. Pernyataan ini tidak menafikan “kemerdekaan” organisasi masyarakat sipil. Sebaliknya, pemerintah/negara mengklaim sebagai pendukung dan mitra gerakan sosial yang dipimpin oleh organisasi sektor ketiga. Misalnya, organisasi masyarakat sipil/sektor ketiga dapat bekerja dengan pemerintah pada tingkat praktis sesuai dengan prinsip

---

<sup>36</sup> Gemma Donnelly Cox dan Andrew O'Regan, “Model Development for Nonprofit Management: A Case Study of Emergent Issues of Theoretical Sufficiency, Managerial Utility, and Pedagogic Capacity,” *EIASM 5th Workshop on the Challenges of Managing the 3rd Sector* (2005).

subsidiaris, dan kerjasama dengan sektor swasta dapat bekerja sesuai dengan hubungan saling menguntungkan.

Bruinessen menjelaskan bahwa masifnya peran aktor non-negara tampaknya sangat dipengaruhi oleh klaim bahwa negara tidak lagi mampu mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan baik. Sistem neoliberalisme diduga berperan dalam gejolak di bidang ekonomi, sosial, dan politik, sehingga mengakibatkan krisis yang memperlebar jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Di tengah gejolak neoliberalisme yang semakin berkembang, negara tidak memperhatikan kelas menengah ke bawah, sehingga pada akhirnya peran ini diambil oleh pihak swasta untuk memberikan kesejahteraan kepada kelas bawah. Beberapa aktor non-negara seperti *Muslim Relief* dan *Muslim Aid* pun terlibat aktif dalam merespon isu-isu kebencanaan dan tanggap darurat.

Appadurai pun menuliskan tentang gerakan masyarakat sipil oleh *SPARC*, *the National Slum Dwellers Federation*, dan *Mahila Milan* yang mampu melakukan kerja pengentasan kemiskinan di India melalui kekuatan lokal dan komunal masyarakat miskin perkotaan yang pada akhirnya dapat menunjukkan jaringan dan peranannya di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Menurutnya, kekuatan lokal berperan dalam pengentasan kemiskinan perkotaan telah memberikan dorongan kuat dalam proses demokratisasi oleh aktor non negara sehingga dapat menghadirkan visi pasca-Marxis dan pasca-developmentalists tentang gerakan lokal dan global

yang dapat menjadi instrumen timbal balik untuk pendalaman demokrasi yang berasal dari bawah.<sup>37</sup>

Organisasi di sektor ketiga ditentukan oleh pengakuan sosial dan legitimasi politik oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi pelbagai masalah sosial. Sebuah studi oleh Taylor, Onyx, Mayo, dan Kenny tentang organisasi sektor ketiga di Inggris mendukung asumsi ini. Pernyataan ini tidak menafikan “kemerdekaan” organisasi masyarakat sipil. Sebaliknya, pemerintah/negara mengklaim sebagai pendukung dan mitra gerakan sosial yang dipimpin oleh organisasi sektor ketiga. Misalnya, organisasi masyarakat sipil/sektor ketiga dapat bekerja dengan pemerintah pada tingkat praktis sesuai dengan prinsip subsidiaris, dan kerjasama dengan sektor swasta dapat bekerja sesuai dengan hubungan saling menguntungkan.<sup>38</sup>

Di Indonesia, inisiasi sektor ketiga telah dilakukan dengan pelbagai cara untuk pengorganisasian, pengembangan dan pemberdayaan, termasuk pendirian lembaga-lembaga sosial yang menyelenggarakan program-program pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Beberapa kelompok agama telah memelopori hal ini sejak awal abad ke 20. Misalnya, dalam komunitas Islam, kelompok agama yaitu *Muhammadiyah* (1912), *Al-Irsyad al-Islamiah* (1914), *Persatuan Islam* (1923), dan *Nahdlatul Ulama* (1926) yang menggarap sektor ketiga.

---

<sup>37</sup> Appadurai, *Deep Democracy: Urban*, 23-43.

<sup>38</sup> Taylor, Onyx, Mayo, Kenny, *Challenging The Third*.

## 5. Studi Kasus Manajemen Kolaborasi di Pelbagai Negara

Chris Ansell dan Alison Gash meneliti 137 kasus *collaborative governance* lintas sektor kebijakan yang berfokus pada proses kolaborasi. Proses kolaborasi yang berkembang dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir termasuk variabel sejarah konflik atau kerjasama, insentif para *stakeholder* yang berpartisipasi, ketidakseimbangan kuasa dan sumberdaya, kepemimpinan, dan desain kelembagaan. Ada juga faktor-faktor yang memengaruhi seperti dialog dalam pertemuan-pertemuan, membangun kepercayaan, dan membangun komitmen dan pemahaman bersama.<sup>39</sup>

Ansell dan Gash juga memberikan beberapa rekomendasi dalam pasca studi 137 kasus *collaborative governance*, yaitu harus adanya kajian pra dan pasca kolaborasi untuk mengkaji perubahan perilaku. Selain perubahan perilaku, variabel waktu, kepercayaan, dan saling ketergantungan juga harus dikaji lebih lanjut.

Maldonado, Maitland, dan Tapia meneliti sistem kolaborasi enam lembaga kemanusiaan internasional di Amerika Serikat dalam merespon pemulihan pasca bencana alam. Mereka mengkaji sistem pengembangan proyek-proyek kemanusiaan juga pada distribusi sumberdaya ke tingkatan yang paling bawah. Lembaga-lembaga kemanusiaan melakukan efisiensi dalam proses kolaborasinya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya, NERC yang membangun manajemen informasi dan satu data

---

<sup>39</sup> Chris Ansell dan Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, No.4 (2008): 544.

dalam pemulihan pasca bencana yang dikolaborasikan dengan enam lembaga tersebut.<sup>40</sup>

Hyun Joo Chang dalam kajian *collaborative governance* di Korea Selatan menerangkan bahwa kolaborasi lintas sektor menggabungkan subdivisi pemerintahan yang melayani kelompok sasaran, menerima peningkatan pendanaan operasional, menyertakan peran swasta yang mewakili layanan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta menerima kesediaan pemerintah daerah.<sup>41</sup> Menurutnya, *collaborative governance* yang dilakukan Korea Selatan merubah cara kerja sistem peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan kolaborasi antar sektor, mencegah pemakaian ganda sumber daya, mengurangi biaya administrasi dengan menghapus program-program duplikat yang dilakukan antar sektor, serta melakukan reorientasi pada pengambil kebijakan.

Stephen Page mengatakan bahwa keterlibatan sipil dalam manajemen kolaboratif sampai pada resolusi konflik dan kerangka taktik kolaborasi saat pemerintahan Walikota Seattle Norman Rice (1990-1998) telah mengarah pada konteks sistem kolaborasi yang lebih besar.<sup>42</sup> Serta dinamika kolaborasi dapat berdampak dan memberikan penyesuaian antar sistem

---

<sup>40</sup> Edgar A. Maldonado, Carleen F. Maitland, dan Andrea H. Tapia, "Collaborative Systems Development in Disaster Relief: the Impact of Multi-level Governance," *Information Systems Frontiers*, Vol. 12 No. 1 (2010): 9-27.

<sup>41</sup> Hyu Joo Chang, "Collaborative Governance in Welfare Service Delivery: Focusing on Local Welfare System in Korea," *International Review of Public Administration* 13 (2009): 75-90.

<sup>42</sup> Steven B. Page, "Integrative Leadership for Collaborative Governance: Civic Engagement in Seattle," *The Leadership Quarterly* 21, (2010): 246-263.

sosial dan politik yang ada. Dari kajian ini juga Page memberikan enam hipotesis, yaitu:

- a. Perubahan dalam taktik kepemimpinan menimbulkan perubahan dalam interpretasi pemangku kepentingan tentang proses tata kelola kolaboratif.
- b. Interpretasi pemangku kepentingan memengaruhi hasil kolaboratif, khususnya, kemauan politik dan kapasitas sipil, karena mereka sangat bergantung pada kontribusi dukungan dan sumber daya pemangku kepentingan dan kemampuan bersama mereka untuk memecahkan masalah.
- c. Kemauan politik dan kapasitas sipil, pada gilirannya, sangat penting untuk kinerja kebijakan: tanpa yang pertama, kebijakan baru tidak akan diberlakukan; tanpa yang kedua, implementasi akan menderita.
- d. Penyesuaian berulang dalam taktik kepemimpinan dari waktu ke waktu mempengaruhi hasil kolaboratif.
- e. Ketika proses kolaboratif menjadi sulit atau mencoba, pemangku kepentingan menarik interpretasi negatif tentang niat atau kemampuan satu sama lain dan tentang legitimasi, pemerataan distribusi, atau potensi integratif inisiatif. Pada gilirannya, pemahaman tentang masalah publik dan peluang kolaboratif berbeda.



- f. Perubahan taktik kepemimpinan yang menanggapi interpretasi negatif ini dengan meningkatkan proses pertemuan dan musyawarah dapat membentuk kembali pemahaman dan persepsi pemangku kepentingan tentang legitimasi dan kesetaraan distribusi kolaborasi. Ketika proses kolaboratif dianggap sah, para pemimpin dan peserta menarik interpretasi positif tentang niat dan kemampuan satu sama lain untuk melakukan proyek bersama, dan kapasitas masyarakat untuk berkolaborasi meningkat.

Di Nepal, Shrestha mengkaji modal social masyarakat dengan pendekatan *collaborative governance*. Kaji dampak modal sosial internal dan eksternal pada kesuksesan kemandirian berorganisasi yang berangkat dari inisiatif masyarakat Nepal untuk program-program air berbasis komunitas.<sup>43</sup> Hasil kajian Shrestha menunjukkan bahwa terjadi sangat sedikit sekali konflik internal dan terjadi kemitraan kolaborasi antar komunitas karena modal sosial antar komunitas yang terus dijaga seimbang tanpa harus ada perdagangan air di antara mereka.

Skelcher, Mathur, dan Smith mencoba mengkaji relasi antara praktik demokrasi dan desain kelembagaan dalam menjalankan ruang-ruang kolaborasi dimana masyarakat, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat

---

<sup>43</sup> Manoj K. Shrestha, "Internal versus External Social Capital and the Success of Community Initiatives: A Case of Self-Organizing Collaborative Governance in Nepal," *Public Administration Review* Vol. 73, No. 1 (2012): 154-164.

ikut bersama membentuk dan mengimplementasikan kebijakan publik.<sup>44</sup> Relasi dalam kolaborasi dapat dilihat dalam tiga sub wacana, yaitu manajerial, asosiasi, dan proses participatif aktor-aktornya.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh mengatakan bahwa model kerja kolaboratif menentukan seperangkat dimensi yang mencakup konteks sistem yang lebih besar, dinamika, dan tindakan kolaboratif internal yang dapat menghasilkan pengaruh dan koordinasi di seluruh sistem. Berikut pendekatan logis model kerangka kerja untuk mengkaji *collaborative governance*.<sup>45</sup>



---

<sup>44</sup> C. Skelcher, N. Mathur, dan M. Smith, "The Public Governance of Collaborative Spaces: Discourse, Design and Democracy," *Public Administration* 83, (2005): 573-596.

<sup>45</sup> Kirk Emerson, dan Tina Nabatchi, "Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix," *Public Performance & Management Review* 38, (2015): 717-747.

Dimensi dan Komponen	Konteks Sistem	Pengaruh	Rezim Tata Kelola Kolaborasi				Outcome Kolaborasi	
			Dinamika Kolaborasi			Output Aksi Kolaborasi	Dampak	Adaptasi
			Prinsip Keterlibatan	Motivasi yang Dibagikan	Kapasitas untuk Aksi Bersama			
Elemen di dalam komponen	- Kondisi Sumberdaya	- Kepemimpinan	- Penemuan	- Keyakinan saling menguntungkan	- pengaturan prosedural/kelembagaan	<b>Akan tergantung pada konteks dan muatan, tapi</b>	akan bergantung pada konteks dan muatan,	- perubahan dalam konteks sistem
	- Kerangka kerja legal Kebijakan	- Konsekuensi Insentif	- Definisi	- Pemahaman saling menguntungkan	- Kepemimpinan		- mengamankan dukungan	tetapi bertujuan untuk mengubah kondisi yang sudah ada sebelumnya atau yang diproyeksikan dalam konteks sistem
	- kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah	- Saling ketergantungan	- Pertimbangan	- legitimasi internal	- Pengetahuan	- pembuatan kebijakan, hukum, dan aturan		- Perubahan dalam Dinamika Kolaborasi
	- Dinamika Politik/Relasi Kuasa	- ketidakpastian	- Tekad	- Komitmen bersama	- Sumberdaya	- Mengarahkan sumberdaya		
	- Keterhubungan jaringan					- mengerahkan staff		
	- Tingkat konflik/kepercayaan					- kedudukan dan perizinan		
	- kesehatan dan keragaman sosial ekonomi/budaya					- membangun/membersihkan		
						- pembuatan praktik manajemen baru		
						- monitoring pelaksanaan		
						- menegakkan kepatuhan		

Tabel 1. Model Kajian *Collaborative Governance* Kirk Emerson, Nabatchi, dan Balogh

## E. Kerangka Teoritis

Kolaborasi dapat digambarkan sebagai hubungan relasional antara satu pihak dengan pihak lain. Lai menjelaskan bahwa kolaborasi adalah keterlibatan timbal balik dari peserta dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah bersama. Interaksi kolaboratif dicirikan oleh tujuan bersama, simetri struktur, dan tingkat negosiasi, interaksi, dan saling ketergantungan yang tinggi.<sup>46</sup> Selanjutnya London mendefinisikan kolaborasi direduksi menjadi definisi paling sederhana yang berarti "bekerja bersama". Kolaborasi memiliki daya tarik yang luas bagi orang-orang dari setiap posisi dalam spektrum politik yang berhubungan dengan suatu proses, program, agenda, atau hasil. Kolaborasi mendorong kita untuk melihat proses di mana kita sampai pada pilihan politik, apa pun pilihan itu.<sup>47</sup>

Kolaborasi tidak *terbatas* oleh masa tertentu. Hal ini didasarkan pada selama adanya proses hubungan timbal balik antar pihak maka ia akan tetap berlangsung. Kolaborasi melibatkan banyak pihak di tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi. Saat bekerjasama, sangat penting antar pihak untuk memahami rekam jejak calon mitra kerjasamanya. Oleh karena itu, penelitian kolaboratif lebih terfokus pada tingkat organisasi sektor publik.<sup>48</sup>

Kerjasama kolaborasi memiliki durasi yang panjang. Inilah perbedaan antara kolaborasi dan kerjasama sinergi. Kolaborasi sebagai suatu proses

---

<sup>46</sup> Lai, Emily R. "Collaborations: A Literature Review." Pearson Research Report, 2.

<sup>47</sup> Scott London, "Collaboration and Community," Pew Partnership for Civic Change, 1-17.

<sup>48</sup> Andrew B. Whitford dan Soo-Young Lee. "Collaborative Behavior and the Performance of Government Agencies," *International Public Management Journal*, (2010): 321-349.

adalah interaksi berkelanjutan oleh banyak orang.<sup>49</sup> Kegiatan kolaborasi membutuhkan perencanaan yang matang secara kolektif dalam rangka menanamkan rasa tanggung jawab bersama, sehingga implementasi kolaborasi tersebut berjalan dengan baik.

Kolaborasi bertujuan untuk mencapai maksud, rencana, target dan tujuan berjasama dengan upaya sinergisitas dalam membantu antar pihak. Abdulsyani berpendapat bahwa kerjasama merupakan suatu bentuk proses kehidupan sosial yang melibatkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>50</sup> Roucek dan Warren menjelaskan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.<sup>51</sup>

Carpenter membagi karakteristik kerjasama menjadi delapan karakteristik, antara lain inklusivitas dan non-hirarki, semua peserta bertanggungjawab untuk mencapai kesuksesan, memiliki tujuan yang rasional dan logis, memiliki masalah bersama, adanya berbagi pengetahuan, adanya diskusi untuk menentukan berbagai pilihan, implementasi secara bersama-sama, adanya informasi tentang perkembangan situasi.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Anderson, McFarlane, *Community as Partner*

<sup>50</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 159.

<sup>52</sup> Mason Carpenter, dan WM. Gerard Sanders, *Strategic Management: A Dynamic Perspective, 2<sup>nd</sup> Edition*, (New Jersey: Pearson Printice Hall, 2009).

Untuk mencapai hasil kolaborasi yang maksimal, pihak yang terlibat dalam kolaborasi perlu memperhatikan beberapa faktor seperti budaya, kepemimpinan, strategi yang digunakan, tim yang terlibat, dan struktur organisasi yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Djumara bahwa ada lima komponen utama dalam kolaborasi:

- a. *Collaborative Culture*. Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis untuk berkolaborasi.
- b. *Collaborative Leadership*. Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.
- c. *Strategic Vision*. Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang berkolaborasi.
- d. *Collaborative Team Process*. Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilan kolaborasi.
- e. *Collaborative Structure*. Pembentukan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis untuk memastikan keberhasilan program yang kolaboratif.<sup>53</sup>

Djumara menjelaskan ada tujuh nilai dasar yang digunakan untuk mengembangkan kerjasama kolaborasi, yaitu pertama, menghormati orang

---

<sup>53</sup> Noorsyamsa Djumara, *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2008): 34-35.

lain; kedua, penghargaan dan integritas memberikan pengakuan, etos kerja; ketiga, rasa memiliki dan bersekutu; keempat, konsensus; kelima, penuh rasa tanggung jawab dan tanggung-gugat; keenam, hubungan saling mempercayai; ketujuh, pengakuan dan pertumbuhan.<sup>54</sup>

Untuk melaksanakan kolaborasi diperlukan beberapa tahapan. Ada tiga tahap penting dalam kolaborasi, yaitu;

- a. Penentuan masalah adalah upaya mengidentifikasi sumber-sumber masalah dan membuat kesepakatan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Di dalam penentuan masalah, terdapat tahapan inisiasi dan motivasi, adanya media komunikasi/informasi, dan analisis bersama terhadap situasi yang terjadi.
- b. Penentuan arah kolaborasi dengan menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok. Pada tahapan ini dilakukan penyatuan informasi yang ada, meneliti berbagai alternatif pilihan, dan memperbanyak kesepakatan yang diinginkan. Di dalam tahap penentuan arah kolaborasi, ada tahapan negosiasi dan kesepakatan diantara *stakeholder* yang tergabung dalam kerjasama kolaborasi, kesepakatan membangun kapasitas untuk perubahan, dan kesepakatan membangun kemitraan dan analisis pelaksanaan.
- c. Implementasi dengan aturan dasar yang telah disepakati dengan pelaksanaan yang harus selalu dimonitor. Di dalam tahap

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, 38.



implementasi, ada tahap memelihara proses kolaborasi, dan membuat dan mendorong mekanisme kelola konflik antar anggota kolaborasi.

Kolaborasi adalah inovasi yang dilakukan oleh beberapa individu atau organisasi yang memungkinkan pemangku kepentingan dan organisasi untuk mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam kolaborasi, inovasi bersama membutuhkan tujuan bersama yang positif terkait pemecahan masalah sosial, menciptakan program baru, dan menemukan alternatif dari sebuah masalah sosial. Kolaborasi menurut Lai adalah keterlibatan timbal balik peserta dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah bersama.<sup>55</sup>

Tata kelola kolaboratif dipakai untuk menyatukan para pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum bersama dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus. Ansell and Gash berusaha mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai sebuah pengaturan dimana satu atau lebih lembaga layanan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Lai, *Collaboration: A Literature*, 1-48.

<sup>56</sup> Ansell, Alison, *Collaborative Governance in*, 544.

Kolaborasi adalah upaya untuk menetapkan aturan yang mengatur dua atau lebih individu atau organisasi yang secara langsung atau tidak langsung mengelola urusan publik non negara. Dalam kerja kolaborasi, masing-masing pihak harus memiliki ikatan formal dan komitmen yang kuat terhadap apa yang telah disepakati sejak awal. Kolaborasi terjadi karena pentingnya tata kelola bersama untuk pengembangan organisasi, pengayaan pengetahuan keterampilan organisasi, dan termasuk juga pengalaman.

Kedua, adalah membangun kepercayaan yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Ketiga, komitmen terhadap proses. Keterlibatan peserta dalam kolaborasi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan proses kolaborasi. Dalam konteks ini, komitmen terhadap proses merupakan hasil dari partisipasi setiap anggota dalam forum-forum diskusi kolaborasi.

Keempat, para pihak yang berkolaborasi saling pengertian dan memahami. Pada titik tertentu dalam proses kolaborasi, pemangku kepentingan perlu mengembangkan pemahaman bersama terkait visi misi, tujuan, ideologi, tujuan, arah strategi, nilai-nilai kolaborasi, dan keselarasan dalam mendefinisikan masalah.

Sudarmo mengatakan ada delapan faktor kunci yang bisa dijadikan kriteria untuk mengukur keberhasilan suatu jaringan kolaborasi yang meliputi tipe *networked structure*, komitmen terhadap tujuan, saling percaya antar pihak yang berkolaborasi, adanya kepastian tata kelola, independent,

adanya pembagian akuntabilitas dan tanggungjawab, adanya pembagian dan keterbukaan informasi, dan ketersediaan atas sumber daya.<sup>57</sup>

Sedangkan beberapa faktor yang menghambat dalam tata kelola kolaborasi adalah faktor budaya, faktor kelembagaan, dan faktor politik. Dalam faktor budaya, ketergantungan terhadap prosedur secara berlebihan, sifat tidak berani mengambil resiko, dan dominasi pendekatan top down dari para pemangku kepentingan dalam kolaborasi.

Dalam faktor kelembagaan, faktor penerapan struktur hirarki di antara pihak-pihak yang berkolaborasi akan menghambat kerja-kerja organisasi dalam mencapai tujuan. Faktor politik dapat menghambat kerja kolaborasi karena kompleksitas tujuan politik yang berakibat pada minimnya invoasi dalam kerja sosial. Sedangkan, dalam kerja kolaborasi, kepemimpinan yang inovatif dibutuhkan untuk membangun bermacam-macam nilai dan mengembangkan agenda tata kelola layanan program untuk masyarakat. Faktor terakhir yang dapat menghambat kerja kolaborasi adalah berubahnya konsensus antar pemangku kepentingan yang terlibat.<sup>58</sup>

Kolaborasi strategis dengan sengaja berfokus pada hasil, produk, atau hasil yang diinginkan sepanjang siklus hidup kolaborasi. Tujuan kolaborasi, definisi data, dan kriteria pro dan penilaian pengumpulan harus memastikan keandalan, standarisasi, dan kebermaknaan bagi peserta dan pemangku kepentingan utama. Kolaborasi juga dapat meningkatkan kapasitas dan

---

<sup>57</sup> Sudarmo, *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*, (Surakarta: Surakarta Smart Media, 2011), 111.

<sup>58</sup> *Ibid.*

kompetensi. Kompetensi terkait kolaborasi mencakup kemampuan untuk bekerja dengan terampil di dalam dan di luar hirarki untuk membingkai konteks lingkungan dari situasi dan kegesitan untuk bekerja dengan seperangkat norma, peran, dan nilai yang muncul. Kolaborasi juga dapat memunculkan sumberdaya dan peluang baru. Dengan demikian, kapasitas, program, dan dampak sumber daya dari kolaborasi strategis menjadi katalis bagi peluang transformasional di masa depan.<sup>59</sup>

Vernis, Iglesias, Sanz, dan Saz-Carranza menjelaskan bahwa kemitraan lintas sektoral antara organisasi nirlaba dan organisasi publik dan bisnis meningkat, kolaborasi menjadi salah satu konsep terpenting bagi organisasi nirlaba. Perubahan lingkungan sosial yang mempengaruhi sektor ketiga dan tantangan yang mereka hadapi mengharuskan organisasi sektor ketiga yaitu aktor non negara untuk melakukan pengembangan kapasitas sebagai cara untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Perubahan pada organisasi nirlaba di sektor ketiga dipengaruhi oleh banyak perubahan besar seperti keragaman kesejahteraan, perkembangan media dan teknologi komunikasi, peningkatan kesukarelaan, peningkatan klaim terhadap ketidakadilan sosial, kesenjangan yang semakin besar antara yang kaya dan yang miskin, semakin masyarakat yang plural dan multisektoral, serta berkembangnya masalah-masalah demografis dan sosial yang baru.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Dorothy Norris-Tirrell, Joy A. Clay, "Strategic Collaboration in Public and Nonprofit Administration: A Practice-Based Approach to Solving Shared Problems," *American Society for Public Administration Book Series on Public Administration & Public Policy*, (2010): 6-10.

<sup>60</sup> Alfred Vernis, Maria Iglesias, Beatriz Sanz, Angel Saz-Carranza, *NonProfit Organizations: Challenges and Collaboration*, (New York: Palgrave Macmillan, 2006).

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus peranan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di bawah Forum Zakat sebagai organisasi berbasis keagamaan (*faith-based organization*) dalam gerakan filantropi Islam di Indonesia selama pandemi COVID-19 tahun 2020-2021. Penelitian ini menggali data dari manajemen Forum Zakat yang memfasilitasi kerja kolaborasi organisasi pengelola zakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lembaga filantropi Islam modern yang menjadi informan yaitu PPPA Daarul Qur'an Yogyakarta, Yatim Mandiri, LAZIS Jateng, dan LAZISNU Kab. Kudus. Tokoh-tokoh yang menjadi informan yang merepresentasikan peran negara dalam filantropi Islam adalah Deputy Pengumpulan BAZNAS RI dan Sekretaris Direktorat Jendral Bina Masyarakat Islam KEMENAG RI sekaligus mantan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf KEMENAG RI tahun 2017-2020. Serta editor buku *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2012-2025* yang peneliti anggap memiliki data-data tentang dinamika gerakan filantropi Islam sejak berdirinya Forum Zakat pada masa Reformasi hingga penelitian ini dilakukan.

Subjek penelitian dalam tesis ini berfokus pada *stake-holder* dalam gerakan zakat di Forum Zakat Nasional, Forum Zakat Wilayah, Kepala Perwakilan lembaga filantropi Islam modern, praktisi filantropi Islam, dan aktor-aktor berpengaruh lainnya di BAZNAS RI dan KEMENAG RI. Subjek penelitian ini yaitu Ketua Umum FOZ, Direktur Eksekutif FOZ, dan Manajer Bidang 2 dan 3: Advokasi dan Kolaborasi periode 2018-2021 FOZ, Ketua FOZ

Wilayah Jawa Tengah sekaligus Direktur LAZIS Jateng, Pengurus Harian FOZ Wilayah Jawa Timur sekaligus Direktur Program Pendayagunaan LAZNAS Yatim Mandiri, Dewan Pembina LAZISNU Kab. Kudus sekaligus editor buku *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2012-2025*, Kepala Perwakilan LAZNAS PPPA Daarul Qur'an Yogyakarta.

Penelitian ini disusun dengan model triangulasi data untuk membangun validitas. Ada tiga metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Dalam wawancara, peneliti menemui informan baik secara daring dan luring. Wawancara daring dilakukan bersama Direktur Eksekutif Forum Zakat, Deputy Pengumpulan BAZNAS RI, dan Ketua Umum FOZ. Wawancara luring dilakukan bersama Manajer Bidang 2 dan 3: Advokasi dan Kolaborasi periode 2018-2021 FOZ, Ketua FOZ Wilayah Jawa Tengah sekaligus Direktur LAZIS Jateng, Pengurus Harian FOZ Wilayah Jawa Timur sekaligus Direktur Program Pendayagunaan LAZNAS Yatim Mandiri, Dewan Pembina LAZISNU Kab. Kudus sekaligus editor buku *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2012-2025*, Kepala Perwakilan LAZNAS PPPA Daarul Qur'an Yogyakarta, dan Sekretaris Direktorat Jendral Bina Masyarakat Islam KEMENAG RI sekaligus mantan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf KEMENAG RI tahun 2017-2020.

Metode kedua yaitu observasi dilakukan dengan mengikuti beberapa agenda Forum Zakat di tingkat nasional dan wilayah, konsolidasi kluster program respon pandemi COVID-19 oleh FOZ, pengambilan profil sampel penerima manfaat program Asa Anak Indonesia yang berkolaborasi antara

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI dengan Forum Zakat, agenda kerjasama antara lembaga filantropi Islam dengan perusahaan swasta lokal di Yogyakarta dalam produksi alat pelindung diri dan masker, sinergi program ketahanan pangan antara PPPA Daarul Qur'an Yogyakarta dengan perusahaan lokal, mengkaji laporan kolaborasi program melalui akun media sosial Forum Zakat, serta berpartisipasi dalam Musyawarah Nasional Forum Zakat ke-9 tahun 2021 di Kota Batu, Jawa Timur.

Metode ketiga melalui kajian dokumen dengan melihat laporan-laporan distribusi dana filantropi Islam melalui program-program respon pandemi COVID-19, arsip publikasi diskusi publik Forum Zakat, laporan pertanggungjawaban Musyawarah Nasional Forum Zakat ke-9 tahun 2021, dan publikasi program respon kebencanaan selama pandemi COVID-19 lainnya yang dapat merepresentasikan keabsahan penelitian. Pada tahap akhir penelitian, seluruh data yang telah dikumpulkan dari ketiga metode penelitian di atas lalu dianalisis dengan teori yang relevan untuk kemudian dideskripsikan hasilnya secara lengkap.

## **G. Sistematika Pembahasan**

1. Bab 1, penulis memaparkan tentang latar belakang masalah penelitian, tujuan, dan manfaat dan kegunaan penelitian secara teoritis, dan akademis. Penulis akan memaparkan tentang kajian pustaka yang berisi beberapa penelitian terdahulu dengan tema *faith-based organization* di pelbagai negara, kajian tentang peranan aktor antar sektor dalam melakukan



program-program sosial, dan paparan tentang kajian teoritis yang berisi beberapa teori tentang tata kelola kolaborasi. Penulis juga akan memaparkan metode penelitian studi kasus.

2. Bab 2, penulis akan memaparkan tentang dinamika tata kelola zakat pada tahun 1998-2021 dan respon Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ketika pandemi awal COVID-19 terjadi di Indonesia.
3. Bab 3, penulis akan memaparkan hasil dan pembahasan terkait penelitian kerja kolaborasi antar sektor yaitu negara, swasta, dan masyarakat sipil yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang difasilitasi oleh Forum Zakat selama pandemi COVID-19.
4. Bab 4, berisi kesimpulan, saran-saran, atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian dan analisisnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Selama pandemi COVID-19 yang berdampak pada sisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia gerakan-gerakan filantropi ikut memberi andil. Sesuai dengan amanah UU No. 23 tahun 2011, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi salah satu garda terdepan untuk melakukan berbagai program sosial, ekonomi, dan pemberdayaan yang berdampak secara langsung ke masyarakat sasaran.

Pandemi COVID-19 yang terjadi Indonesia sejak April 2020 lalu berdampak perubahan di segala bidang sosial masyarakat, termasuk salah satunya manajemen Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sebelumnya, kompetisi antar OPZ terlihat di berbagai strategi pemasaran, ragam program pendayagunaan, sampai etalase media sosial yang massif dipublikasikan. Manajemen OPZ yang sebelumnya lekat dengan kompetisi antar organisasi di panggung filantropi terjadi di skala kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional sejak awal pandemi COVID-19 pun dengan cepat bergerak berubah dari kompetisi menuju gerakan-gerakan kolaborasi antar organisasi di skala kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional yang dikelola dan diarahkan oleh Forum Zakat (FOZ). Perubahan-perubahan tata kelola Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini yang dirasa penting untuk dikaji lebih dalam melalui penelitian ini.

Dalam penelitian ini, analisis dimulai dari pembentukan kluster program Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional dikelompokkan berdasarkan program respon setiap organisasi terhadap dampak pandemi COVID-19. Pada kluster program selama tiga bulan awal pandemi COVID-19 di Indonesia, yang dilakukan 98 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) anggota Forum Zakat, ada 3 besar program respon COVID-19 tahun 2020 pada pandemi awal, yaitu logistik dan perlengkapan kebersihan, edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan layanan disinfeksi. Tiga besar program tersebut adalah program yang memang dibutuhkan masyarakat di lapangan secara umum ketika awal menghadapi pandemi COVID-19. Menurut data lapangan yang ditemukan, pemberlakuan dokumen protokol kesehatan tidak dilakukan di lebih dari 58% anggota Forum Zakat karena dokumen *Joint Protocol* Respon Kebencanaan yang ada belum memiliki standar respon pada COVID-19, meskipun sudah memiliki rekomendasi-rekomendasi protokol berdasarkan edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pada tiga program dengan presentase respon terkecil seperti adanya relawan kesehatan khusus, layanan jenazah, dan layanan psikososial hanya dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah memiliki program-program kesehatan khusus sejak sebelum pandemi COVID-19 seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan BAZNAS RI. Tiga program respon dengan presentase terkecil ini juga disebabkan oleh pemberlakuan protokol kesehatan

standar pandemi COVID-19 yang baru sehingga banyak lembaga yang belum bisa menerapkan respon program di bidang kesehatan secara khusus ini.

Pada publikasi data “Crisis Center COVID-19 FOZ-BAZNAS” pada 17 Maret 2020, ada 24 organisasi pengelola zakat yang mengumumkan nomor layanan hotline untuk masyarakat umum yang didukung oleh tenaga medis untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi dan berkonsultasi tentang COVID-19. Agus Budiyanto, Direktur Eksekutif Forum Zakat periode 2018-2021, menjelaskan bahwa pada awal pandemi COVID-19 yang mayoritas dari masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk meresponnya, maka layanan hotline ini menjadi penting menjadi langkah awal memberikan edukasi dan meredam kepanikan, meskipun pada akhirnya layanan hotline ini pun ramai diakses oleh masyarakat.

Kluster program respon selama masa pandemi COVID-19 awal sejak April-Juli 2020 ini adalah respon manajemen Forum Zakat untuk mempertajam dan mengatur lalu lintas program distribusi agar tepat sasaran dan efisien dengan mempertimbangkan berbagai faktor kedaruratan yang terjadi. Selama tahun 2021, kluster program yang dibangun oleh Forum Zakat berubah menjadi kompartemen kolaborasi yang lebih mapan dan holistik. Kompartemen kolaborasi mensyaratkan berlakunya karakteristik, kesesuaian komponen kolaborasi, dan memiliki prinsip-prinsip yang lebih fundamental dibanding proses penyusunan kluster program sebelumnya.

Pada 25 November 2021, Forum Zakat pun mensosialisasikan pada anggotanya tentang “Menyusun Gerakan Zakat Kompak dan Berdampak: Kompartemen Kolaborasi” dalam acara Leaders Talk #2 yang diisi oleh Bambang Suherman, Ketua Umum Forum Zakat dua periode yaitu 2018-2024. Inisiasi kompartemen kolaborasi program oleh anggota Forum Zakat dilakukan atas kesepakatan bersama untuk mempertajam dan mempertimbangkan dampak program secara keberlanjutan (sustain) dan keluasannya. Inisiasi kompartemen kolaborasi sejak tahapan awal mewajibkan setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk saling bertemu dan menyepakati macam program kolaborasi sesuai dengan portofolio program unggulan masing-masing yang seragam antar anggota. Sampai pada tahapan pra rilis kompartemen kolaborasi, konsensus atau kesepakatan dibangun dengan perjanjian kerjasama kolaborasi yang disusun bersama secara transparan dan partisipatif.

Ke depannya, para anggota Forum Zakat akan memproduksi sebanyak mungkin kompartemen kolaborasi yang berorientasi program-program aksi lapangan berbasis portofolio program unggulan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Kompartemen kolaborasi akan menjadi tanda seberapa produktifnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia dengan bukti-bukti program lapangan yang semakin banyak sehingga akan meningkatkan partisipasi publik, produksi riset, donasi, informasi, dan partisipasi banyak pihak.

Kompartemen kolaborasi adalah model dari munculnya program unggul ke permukaan dan diekspos supaya publik memahami dan memiliki referensi lebih tentang manfaat zakat juga peningkatan kepercayaan publik (trust public)

pada program unggul yg riil dan berbasis komoditas barang dan jasa. Skema pemberdayaan masyarakat akan dipastikan menjadi unit usaha untuk peningkatan kesejahteraan yang diukur dari standar yang berlaku, minimal UMP/UMK agar menguntungkan dan dapat diukur dalam agenda pengentasan kemiskinan.

Di dalam skema kompartemen kolaborasi ini akan bisa mereplikasi program Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi program bersama. Jika pola ini terjadi, maka akan terjadi pembagian (sharing). Masing-masing Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bisa hadir untuk ikut serta berkontribusi. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang besar akan membesarkan dan menguatkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang kecil, sehingga akan terjadi pertumbuhan gerakan zakat secara bersama bersama. Skema ini yang diharapkan untuk muncul di gerakan zakat Indonesia melalui tata kelola kolaborasi, sehingga kolaborasi ke depannya bukan sekedar menjadi jargon, tetapi juga memiliki dampak yang langsung dirasakan di masyarakat. Contoh implementasi kompartemen kolaborasi program yang sudah dirilis oleh Forum Zakat adalah sebagai berikut Kampuszakat.com, Asanakindonesia.com, Sentra madu Trigona di Lombok,, Sentra Ternak Doka Magetan, Beasiswa SDM Produktif Indonesia, dan Dakwah Zakat.

Munculnya pelbagai kompartemen kolaborasi di atas menjadi bukti lapangan bahwa aktor negara dari sektor ketiga (sipil) sudah dapat mengelola kekuatan atau modal sosialnya dengan inisiatif dan program-program layanan sosial yang responsif dan mandiri. Kluster program dan kompartemen

kolaborasi yang difasilitasi oleh Forum Zakat (FOZ) membuktikan bahwa gerakan masyarakat sipil pun dapat mengkolaborasikan sektor ketiga dan swasta melalui gerakan filantropi Islam di tingkat lokal hingga nasional. Gerakan filantropi Islam yang kolaboratif antar sektor pada akhirnya akan mendorong proses demokratisasi oleh aktor non negara sehingga dapat menghadirkan visi pasca-Marxis dan pasca-developmentalists tentang gerakan lokal dan global yang dapat menjadi instrumen timbal balik untuk pendalaman demokrasi yang berasal dari bawah.

Pada kerja kolaborasi Organisasi Pengelola Zakat dengan negara, melalui Forum Zakat berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Republik Indonesia dalam merespon kemunculan anak-anak yatim karena COVID-19 dalam program Asa Anak Indonesia. Selain itu, sejak awal pandemi COVID-19, Forum Zakat telah berkolaborasi dengan BAZNAS RI dan BASARNAS RI dalam pelaksanaan protocol kesehatan di lingkungan kerja organisasi filantropi Islam. Contoh lainnya adalah kolaborasi distribusi 10.000 paket bantuan sosial sembako Kementerian Sosial RI dengan LAZNAS PPPA Daarul Qur'an di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Bentuk lain kolaborasi antar sektor yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah dengan bekerja sama dengan sektor swasta dengan produksi alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan dan tenaga desinfeksi public saat terjadi kelangkaan alat pelindung diri. Misalnya yang dilakukan oleh LAZNAS PPPA Daarul Qur'an Perwakilan Yogyakarta



bersama PT. Dagadu Aseli Yogyakarta pada tahun 2020. Program bantuan sembako untuk masyarakat rentan juga disinergikan antara LAZNAS PPPA Daarul Qur'an Perwakilan Yogyakarta dengan perusahaan Ederra Indonesia yang menasar pada lansia, masyarakat yang kehilangan pekerjaan selama pandemi, dan masyarakat dhuafa lainnya.

Contoh kerja kolaborasi antar sektor yaitu negara, swasta, dan organisasi pengelola zakat di atas menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil/sektor ketiga dapat bekerja dengan pemerintah pada tingkat praktis sesuai dengan prinsip subsidiaris, dan kerjasama dengan sektor swasta dapat bekerja sesuai dengan hubungan saling menguntungkan karena organisasi sektor ketiga memiliki kecepatan respon dan prinsip efektivitas dan efisiensi distribusi layanan sosial.

Kompartemen kolaborasi selama pandemi COVID-19 akan menjadi produk gerakan zakat dan portofolio program unggulannya. Kompartemen kolaborasi akan menciptakan ekspansi literasi para pihak baik swasta dan pemerintah maupun para pegiat kemanusiaan di masyarakat. Dengan adanya kompartemen kolaborasi menjadi asset untuk memberikan pengetahuan pengelolaan zakat ke semua pihak.

Penjelasan di atas pun memberikan ruang diskusi terbuka tentang masa depan gerakan filantropi Islam pasca pandemi COVID-19. Jika sebelumnya gerakan filantropi Islam diwarnai dengan kontestasi peran antara negara dan aktor non negara seperti yang dijelaskan oleh para ahli sebelumnya maka

kemunculan gerakan kolaborasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang difasilitasi Forum Zakat selama pandemi COVID-19 memungkinkan kerja kolaborasi antar sektor pada masa depan dengan permasalahan dan kebutuhan bersama secara nasional. Dengan penelitian ini dapat dilihat proses penerapan pengelolaan kolaborasi oleh Forum Zakat selama pandemi COVID-19 mampu melakukan optimalisasi peran aktor non negara, membangun kerja kolaborasi antar sektor, mengklasifikasi kebutuhan, dan menentukan strategi pengelolaan gerakan zakat Forum Zakat yang lebih berdampak ke masyarakat secara efektif dan efisien.

Kemudian, ruang diskusi tentang kontestasi peranan negara dan aktor non negara dalam filantropi Islam telah dibuktikan dapat istirahat sejenak sebab kedaruratan bencana selama pandemi COVID-19 dengan kerja-kerja kolaborasi antar sektor. Pandemi COVID-19 telah menyadarkan negara, swasta, dan aktor non negara untuk bekerjasama meleburkan kontestasi peranan ke ruang kerja kolaboratif.

## **B. Rekomendasi Teoritis dan Praktis**

Manajemen Forum Zakat Nasional selama pandemi COVID-19 di Indonesia telah membuktikan pengembangan kolaborasi antar anggota Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di bawahnya melalui berbagai macam intervensi program di bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan pemulihan ekonomi terdampak. Meski pada awalnya berbentuk kluster program pada awal pandemi COVID-19, Forum Zakat perlahan mengembangkan kompartemen

kolaborasi antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang menjadi anggotanya. Hal ini memberikan bukti bahwa prinsip manajemen kolaborasi dari tahap perencanaan program sampai pada aksi lapangannya telah dilakukan selama periode 2020 hingga 2021 oleh Forum Zakat. Model kolaborasi program oleh anggota Forum Zakat merupakan pengembangan implementasi manajemen kolaborasi yang telah dijalankan dan akan dikembangkan menjadi berbagai kompartemen kolaborasi program lainnya secara organik.

Model proses manajemen kolaborasi pelaksanaan program oleh Forum Zakat selama masa pandemi awal selama 2020 hingga 2021 tetap membutuhkan manajemen yang mengontrol setiap tahapan pembentukan kompartemen kolaborasi secara rigid dan tertib untuk menjaga kestabilan kompartemen kolaborasi. Di sisi lain, sosialisasi dan monitoring proses pembentukan kompartemen kolaborasi tetap dibutuhkan sampai manajemen Forum Zakat di tingkat wilayah/provinsi hingga kabupaten/kota agar pengelolaan potensi dan kerja sosial dari masyarakat sipil melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat optimal di seluruh lapisan masyarakat mengingat permasalahan sosial dan kebencanaan yang terjadi di Indonesia masih sangat besar peluang intervensi berbagai pihak, terutama dalam misi pengentasan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Aldrich, Daniel P. 2012. *Social Capital in Post Disaster Recovery: Towards a Resilient and Compassionate East Asian Community*. Jakarta: ERIA
- Alfred Vernis, Maria Iglesias, Beatiz Sanz, Angel Saz-Carranza. 2006. *NonProfit Organizations: Challenges and Collaboration*. New York: Palgrave Macmillan
- Amar, F. 2017. *Implementasi Filantropi Islam di Indonesia*. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
- Amar, F. 2017. *Implementasi Filantropi Islam di Indonesia*. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
- Amelia Fauzia, Sri Hidayati, Emi Ilmiah, dan Endi Aulia Garadian. 2018. Laporan Hasil Penelitian Fenomena Praktik Filantropi Masyarakat Muslim dalam Kerangka Keadilan Sosial di Indonesia. Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Anderson, E.T. & J. McFarlane. 2004. *Community as Partner Theory and Practice in Nursing 4th Ed*. Philadelphia
- Andrew B. Whitford, Soo-Young Lee, Taesik Yun & Chan Su Jung. 2010. *Collaborative Behavior and The Performance of Government Agencies*, International Public Management Journal
- Ansell, Chris &, Alison Gash. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory
- Arjun Appadurai, "Deep Democracy: Urban Governamentality and the Horizon of Politics", *Environment & Urbanization*, Vol. 13, No. 2, October 2001
- Asep Saepudin Jahar. Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Miqot*, Vol. 39, No. 2, 2015
- Bornstein, Erica. 2003. *The Spirit of Development Protestant NGO's, Morality, and Economics in Zimbabwe*. New York: Routledge
- Bornstein, Erica. 2003. *The Spirit of Development Protestant NGO's, Morality, and Economics in Zimbabwe*. New York: Routledge
- Borrini-Feyerabend, G., M.T. Farvar, J.C. Nguingiri and V.A. Ndangang. 2000. *Co-Management of Natural Resources: Organizing, Negotiating and Learning-by-Doing*. GTZ and IUCN. Heidelberg
- Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard. 2009. *Strategic Management: A Dynamic Prespective, 2nd Edition*. New Jersey: Pearson Printice Hall

- Chang, Hyu Joo. 2009. *Collaborative Governance in Welfare Service Delivery: Focusing on Local Welfare System in Korea*. International Review of Public Administration 13
- Cihan Tugal, "Contesting Benevolence: Market Orientations Among Muslim Aid Providers in Egypt", *Qualitative Sociology* 36, No. 2, (2013)
- Cox, Gemma Donnelly. O'Regan, Andrew. 2006. *Model Development for Nonprofit Management: A Case Study of Emergent Issues of Theoretical Sufficiency, Managerial Utility, and Pedagogic Capacity*. Makalah di *EIASM 5th Workshop on the Challenges of Managing the 3rd Sector*, Queens University Belfast Dublin
- Djumara, Noorsyamsa. 2008. *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Dorothy Norris-Tirrell & Joy A. Clay. 2010. *Strategic Collaboration in Public and Nonprofit Administration: A Practice-Based Approach to Solving Shared Problems*. American Society for Public Administration Book Series on Public Administration & Public Policy
- Egbert Harmsen. 2008. *Islam, Civil Society and Social Work: Muslim Voluntary Welfare Associations in Jordan Between Patronage and Empowerment*. Leiden: Amsterdam University Press
- Emerson, Kirk. Nabatchi, Tina. 2015. *Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix*. *Public Performance & Management Review* 38 (4)
- Emerson, Kirk. Nabatchi, Tina. Stephen Balogh. 2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Fauzia, Amelia. 2016. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading
- Fauzia, Amelia. 2016. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading
- Field. John. 2018. *Modal Sosial Edisi Kelima*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Forum Zakat. 2012. *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2012-2025*. Forum Zakat: Jakarta Selatan
- Gaillard, JC. Texier, P. 2010. *Religions, Natural Hazards, and Disasters: An Introduction*. Religion Vol. 40
- Henry, N. 1995. *Public Administration and Public Affairs Sixth Edition*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice –Hall
- Jonathan Benthall, "Financial Worship: the Quranic Injunction to Almsgiving", the *Journal of the Royal Anthropological Institute*, Vol. 5, No. 1 (Mar., 1999)
- K. Santana, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia



- Kamal, Masud A. dan Monirul Hassan, *The Link Between Social Capital and Disaster Recovery: Evidence from Coastal Communities in Bangladesh*, dalam *Natural Hazards* Vol. 93 No. 3 (September 2018), 1548, di bawah <https://www.researchgate.net/publication/325475672> (diakses pada 30 Oktober 2019).
- Konstantinos Retsikas. 2020. *A Synthesis of Time: Zakat, Islamic Micro-finance and the Question of the Future in 21st Century Indonesia*. Switzerland: Springer
- Lai, Emily R. 2011. *Collaboration: A Literature Review*. Pearson
- Latief. Hilman. 2013. *Politik Filantropi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Lindeke, L., Sieckert, A. M. 2005. *Nurse-Physician Workplace Collaboration*. Online Journal of Issues in Nursing
- Loebach, Peter, Julie Stewart. 2015. *Vital Linkages: A Study of the Role of Linking Social capital in a Phillipine Disaster Recovery and Rebuilding Effort*. Social Justice Research Vol. 28 (Juli 2015), 339-362, di bawah <https://www.researchgate.net/publication/282478337> (diakses pada 30 Oktober 2019)
- Maldonado, Edgar A., Maitland, Carleen F., Tapia, Andrea H.. (2010). *Collaborative Systems Development in Disaster Relief: the Impact of Multi-level Governance*. Information Systems Frontiers 12 (1)
- Marilyn Taylor, Jenny Onyx, Marjorie Mayo, Sue Kenny. 2015. *Challenging The Third Sector: Global Prospects For Active Citizenship*. Policy Press
- Maryolo, A. 2018. *Filantropi Berbasis Faith Based Organization di Indonesia (Studi Kasus Program PKPU)*. Palita: Journal of Social Religion Research
- Meila Riskia Fitri, Putri Rima Jauhari. Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Perusahaan dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia. *Jurnal Resiprokal* Vol. 2, No. 2 Desember 2020
- Minako Sakai, "Muslimah, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat", Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018
- Page, Steven B. 2010. *Integrative leadership for collaborative governance: Civic engagement in Seattle*. The Leadership Quarterly 21 (2)
- Permata, Inda Mustika. Nanda, Bima Jon. Dermawan, Rifki. 2021. *The Importance of Social Capital for Faith Based Organizations in the New Normal Adaptation of West Sumatera*. *Islam Realitas* Vol. 7 No. 1
- Prasojo. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*
- Regnerus, M.D. 2003. *Religion and Positive Adolescent Outcomes: A Review of Research and Theory*. *Review of Religious Research*
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press

- Santana, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Scott London. 2016. *Collaboration and Community*, diunduh dari <http://www.scottlondon.com/reports/collaboration.pdf>
- Shrestha, Manoj K. 2012. *Internal versus External Social Capital and the Success of Community Initiatives: A Case of Self-Organizing Collaborative Governance in Nepal*. *Public Administration Review* Vol. 73 Issue 1
- Skelcher, C., Mathur, N., & Smith, M. 2005. *The Public Governance of Collaborative Spaces: Discourse, Design and Democracy*. *Public Administration*, 83
- Slamet, Yulius. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Solo: UNS Press
- Smidt, Corwin. 2003. *Religion as Social Capital*. Texas: Baylor University Press
- Steven L., Yaffee and Julia Wondolleck. 2003. *Collaborative Ecosystem Planning Processes in the United States: Evolution and Challenges*. *Jurnal Environments*
- Sudarmo. 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. SMART Media: MAP UNS
- Tim Pusat Studi Gempa Nasional. 2018. *Kajian Rangkaian Gempa Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Balitbang Kementerian PUPR
- Tosone, Carol (ed.). 2020. *Shared Trauma, Shared Resilience During a Pandemic: Social Work in the Time of COVID-19*. New York: Springer
- Tse, Chun-Wing, Jianwen Wei, dan Yihan Wang. 2013. *Social Capital and Disaster Recovery: Evidence from Sichuan Earthquake in 2008* (December, 2013), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2440405>
- Tugal, Cihan, 2017. *Caring for the Poor: Islamic and Christian Benevolence in a Liberal World*. New York: Routledge
- Tugal, Cihan, 2017. *Caring for the Poor: Islamic and Christian Benevolence in a Liberal World*. New York: Routledge
- Usman, Sunyoto. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press

### **Laman Situs**

- <https://bnpb.go.id/dampak-gempa-lombok-436-orang> (diakses pada 28 Oktober 2019)
- <https://forumzakat.org/raker-foz-spirit-kolaborasi-bagian-1/> diakses pada Selasa, 10 Mei 2022 pukul 18.09 WIB



<https://mski-fah.uinjkt.ac.id/index.php/2021/08/07/filantropi-dalam-arus-sejarah-islam-dan-relevansinya-terhadap-dunia-profesional/> diakses pada 24 April 2022 pukul 19.09 WIB

<https://www.republika.co.id/berita/qu41eu423/optimalisasi-peran-lembaga-amil-zakat-di-masa-pandemi> yang diakses pada 25 Mei 2022 pukul 11.05 WIB

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/405998/ruang-publik-kedermawanan-hari-ini> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 18.21 WIB

Widadio, *Menata Hidup Baru di Kampung Al-Quran Usai Bencana Berlalu*, di bawah <https://www.aa.com.tr/id/budaya/menata-hidup-baru-di-kampung-al-quran-usai-bencana-berlalu-/1371360>

